



RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
2020-2024

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,
dan Pendidikan Menengah

2022

RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR,
DAN PENDIDIKAN MENENGAH
TAHUN 2020-2024

KATA PENGANTAR

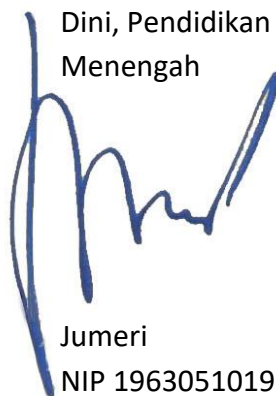
Sebagai salah satu unit utama di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mempunyai tugas fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Pelaksanaan tugas fungsi tersebut merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang merupakan bahan perumusan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis sebagai dokumen utama yang memuat visi, misi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta kebijakan, tujuan strategis, sasaran program dan indikator kinerja program (IKP) pembangunan bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, menjadi salah satu pedoman pelaksanaan kinerja organisasi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selain itu, Rencana Strategis ini lebih lanjut dijabarkan ke dalam rencana kinerja atau program kerja tahunan yang sekaligus juga menjadi rujukan untuk mengevaluasi capaian program dan kegiatan dalam periode lima tahunan.

Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Tahun 2020-2024 menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen sebagai penggerak sektor pembangunan PAUD, Dikdas, dan Dikmen hingga periode tahun 2024. Renstra Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Tahun 2020-2024 ini mendukung pencapaian program Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.

Jakarta, April 2022

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia
Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah



Jumeri

NIP 196305101985031019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN	16
A. Visi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	16
B. Dukungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	17
C. Tujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	17
D. Sasaran Program Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	18
E. Perspektif Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	18
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	22
A. Arah kebijakan dan Strategi	22
B. Kerangka Kelembagaan.....	39
C. Reformasi Birokrasi	49
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	53
A. Target Kinerja.....	53
B. Kerangka Pendanaan	56
BAB V PENUTUP	59
LAMPIRAN.....	61
Lampiran 1a. Matriks dan Pendanaan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Tahun 2020	61
Lampiran 1b. Matriks dan Pendanaan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Tahun 2021	68
Lampiran 1c. Matriks dan Pendanaan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Tahun 2022-2024.....	75
Lampiran 2. Definisi Operasional, Metode Penghitungan, dan Sumber Data.....	84

DAFTAR TABEL

TABEL 1:	TUJUAN DITJEN PAUD, DIKDAS DAN DIKMEN TAHUN 2020-2024	17
TABEL 2:	PROGRAM DAN SASARAN PROGRAM (SP) DITJEN PAUD, DIKDAS DAN DIKMEN TAHUN 2020-2024.....	18
TABEL 3:	KEBIJAKAN DAN STRATEGI MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	23
TABEL 4:	KEBIJAKAN DAN STRATEGI REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN.....	24
TABEL 5:	KEBIJAKAN DAN STRATEGI REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA.....	25
TABEL 6:	KERANGKA REGULASI	30
TABEL 7:	JUMLAH ASN DITJEN PAUD, DIKDAS DAN DIKMEN TAHUN 2022	48
TABEL 8:	PROYEKSI KEBUTUHAN SDM DITJEN PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN TAHUN 2020-2024	49
TABEL 9:	8 (DELAPAN) AREA PERUBAHAN	50
TABEL 10:	SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR, DAN TARGET KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PAUD, DIKDAS DAN DIKMEN.....	54
TABEL 11:	SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PAUD, DIKDAS DAN DIKMEN.....	55
TABEL 12:	KERANGKA PENDANAAN RENCANA STRATEGIS DITJEN PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN TAHUN 2021-2022.....	57
TABEL 13:	KEBUTUHAN PENDANAAN DITJEN PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN	58

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1:	CAPAIAN ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PAUD TAHUN 2015-2021.....	3
GAMBAR 2:	CAPAIAN ANGKA KESIAPAN SEKOLAH (AKS) PAUD TAHUN 2016-2020	4
GAMBAR 3:	CAPAIAN ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) JENJANG SD DAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) 7-12 TAHUN 2015-2021	4
GAMBAR 4:	SEBARAN CAPAIAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) 7-12 TAHUN 2021	5
GAMBAR 5:	CAPAIAN ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) JENJANG SMP DAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) 13-15 TAHUN 2015-2021	6
GAMBAR 6:	SEBARAN CAPAIAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) 13-15 TAHUN 2021	6
GAMBAR 7:	CAPAIAN ANGKA PARTISIPASI KASAR SMA/SEDERAJAT BERDASARKAN KELOMPOK EKONOMI TAHUN 2021 DAN ANGKA PARTISIPASI KASAR SMA/SEDERAJAT TAHUN 2015-2021.....	7
GAMBAR 8:	SEBARAN CAPAIAN ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) JENJANG SMA TAHUN 2021 PER PROVINSI	7
GAMBAR 9:	CAPAIAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH BERDASARKAN KELOMPOK EKONOMI DAN STATUS DISABILITAS TAHUN 2021	8
GAMBAR 10:	CAPAIAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH BERDASARKAN GENDER TAHUN 2021	8
GAMBAR 11:	PERSENTASE SEKOLAH DENGAN AKREDITASI MINIMAL B TAHUN 2015-2019	9
GAMBAR 12:	CAPAIAN SKOR PISA INDONESIA TAHUN 2000-2018	10
GAMBAR 13:	SEBARAN CAPAIAN SKOR AKSI SMP PER PROVINSI TAHUN 2019	11
GAMBAR 14:	PERUBAHAN CAPAIAN KOTA/KABUPATEN PADA UN ANTARA TAHUN 2016 DAN 2018	12
GAMBAR 15:	ANGGARAN PENDIDIKAN PUSAT DAN DAERAH TAHUN 2015-2021 (TRILIUN RUPIAH)	13
GAMBAR 16:	DIMENSI-DIMENSI PROFIL PELAJAR PANCASILA.....	19
GAMBAR 17:	STRUKTUR ORGANISASI DITJEN PAUD, DIKDAS DAN DIKMEN	40

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bagian dari komponen pembangunan yang menjadi tumpuan dasar dari berbagai cita-cita bangsa. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (RPJPN 2005-2025), Visi Misi Presiden dan RPJMN 2020-2025, dan Visi Indonesia 2045, sebagai berikut:

- Cita-cita dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah "... memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...";
- RPJPN 2005-2025 memiliki visi "...terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia dan masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan ... persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah NKRI";
- Dua dari sembilan misi presiden yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia dan kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- Sasaran pembangunan RPJMN 2020-2025 adalah "masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur ... keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing"; serta
- Salah satu dari empat pilar Visi Indonesia 2045 yaitu "Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi".

Kemampuan suatu bangsa untuk menjadi sejahtera, cerdas serta berdaya saing di tengah isu globalisasi dan unggul dalam penguasaan inovasi teknologi akan bertumpu pada kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini tidak hanya terbatas pada kecerdasan dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains, tetapi juga pembangunan SDM yang berakhlak mulia, berakarakter kuat, toleran, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan selalu siap bekerja sama.

Kaitannya dengan upaya nasional dalam pembangunan manusia, perhatian khusus perlu diberikan pada agenda pengarusutamaan kebudayaan. Oleh karena itu, landasan untuk pembangunan SDM tersebut harus melalui pendekatan pemajuan kebudayaan yang sifatnya tidak hanya melestarikan budaya tradisi, tetapi juga memajukannya melalui interaksi antarbudaya untuk memperkaya keanekaragaman yang menyejahterakan, mencerdaskan, dan mendamaikan, sebagaimana Visi Kebudayaan Indonesia 2040, hasil dari Kongres Kebudayaan Indonesia 2018.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita yang diharapkan dari pembangunan pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, maka Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen) harus mengelola kesinambungan dari upaya-upaya pembangunan yang telah, sedang dan akan dilakukan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan bidang pendidikan dan kebudayaan merupakan urusan konkuren, yaitu urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Untuk itu, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen perlu menerjemahkan upaya-upaya tersebut dalam dokumen kebijakan jangka menengah, yakni dalam dokumen Renstra. Dokumen Renstra Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dimaksud akan menjadi haluan bagi strategi pembangunan pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen baik bagi 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota, maupun pemangku kepentingan lainnya.

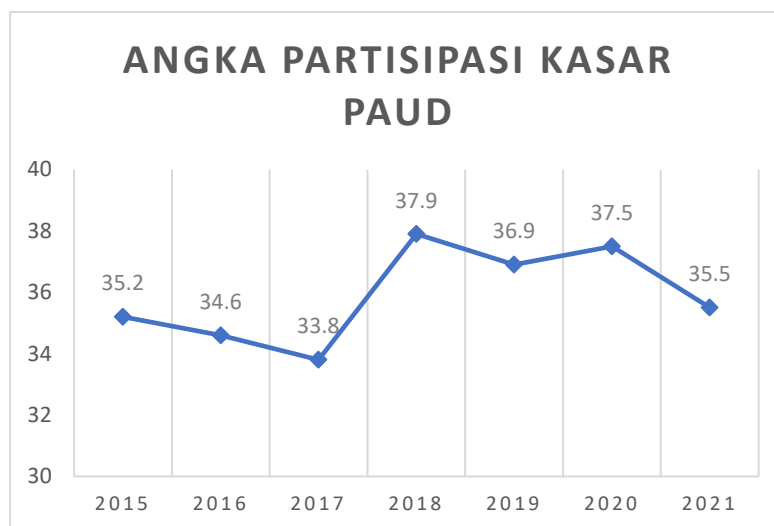
Dokumen Renstra Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Tahun 2020-2024 ini merupakan penyempurnaan dan penyesuaian menyikapi restrukturisasi fungsi pada Kemdikbudristek. Selain untuk menjabarkan tugas dan kewenangan baru tersebut, penyempurnaan Renstra juga dilakukan untuk mempertajam strategi dan upaya-upaya dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19. Covid-19 yang merebak di awal tahun 2020 telah menyebabkan 60 juta anak usia sekolah tidak dapat melakukan pembelajaran secara optimal di sekolah. Maka, perubahan Renstra ini juga akan membawa upaya-upaya menekan dampak turunnya kualitas belajar siswa yang disebabkan proses belajar mengajar yang tidak optimal selama pandemi. Upaya ini akan dilakukan salah satunya dengan melakukan akselerasi transformasi pendidikan. Transformasi pendidikan ini diharapkan membuka kesempatan bagi semua satuan pendidikan, guru dan peserta didik dapat secara mandiri melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan.

Renstra Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen 2020-2024 ini disusun sesuai dengan pedoman teknis penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga yang diatur oleh Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Renstra ini lebih mengkrystalkan peran Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen ke Kementerian dalam mendukung tercapainya visi dan misi Presiden serta Wakil Presiden.

Kondisi Umum Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

1. Akses

Gambar 1: Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Tahun 2015-2021

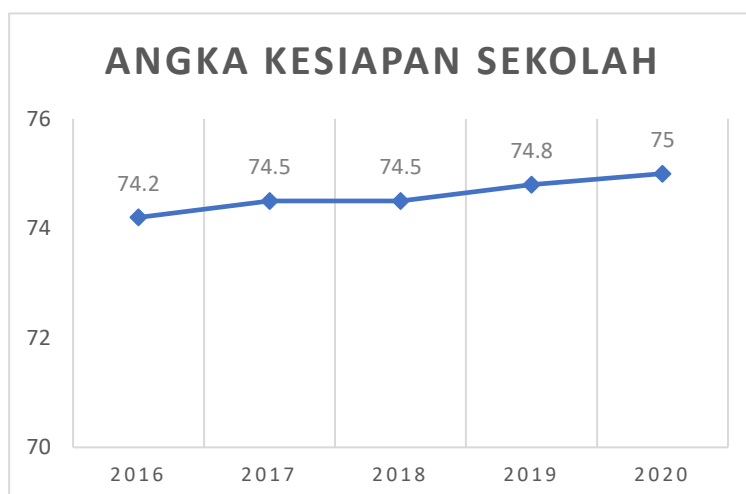


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015-2021

Secara umum, capaian APK PAUD meningkat pada periode tahun 2015-2020, meski sempat terjadi penurunan di tahun 2015-2017, yakni peningkatan anak usia PAUD tidak diiringi dengan penambahan jumlah satuan PAUD. Peningkatan APK PAUD kembali terjadi pada 2018-2020 dari 33,8 menjadi 37,9 yang antara lain disebabkan oleh peningkatan jumlah satuan pendidikan PAUD serta peningkatan anggaran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD melalui dana transfer. Namun tahun 2021 terjadi pandemi covid-19 dimana diberlakukan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ), sehingga banyak orangtua cenderung tidak mendaftarkan anaknya yang berusia 5-6 tahun ke jenjang PAUD yang menyebabkan terjadinya penurunan APK PAUD.

Untuk lebih memastikan kesiapan anak memasuki jenjang sekolah dasar, kebijakan bidang PAUD fokus pada program pendidikan 1 tahun prasekolah. Kebijakan ini selaras kebijakan nasional yang tercantum pada RPJMN dan juga menjadi bagian dari kebijakan global pada Sustainable Development Goals, serta merupakan salah satu dari kebijakan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. Untuk mengukur keberhasilan program tersebut, Kemendikbudristek menggunakan angka kesiapan sekolah (AKS) sebagai alat ukur untuk menggambarkan kesiapan anak memasuki jenjang sekolah dasar. AKS merupakan angka indeks persentase proporsi anak kelas satu SD pada tahun berjalan yang sudah pernah mengikuti pendidikan prasekolah.

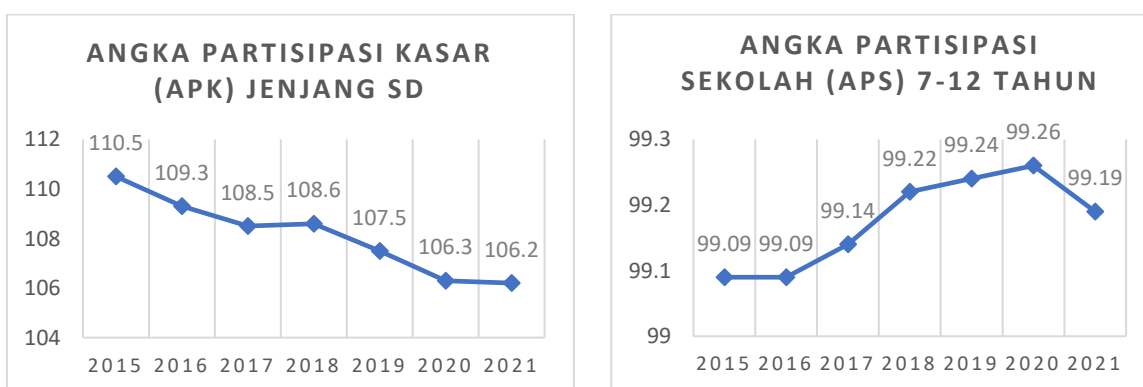
Gambar 2: Capaian Angka Kesiapan Sekolah (AKS) PAUD Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016-2020

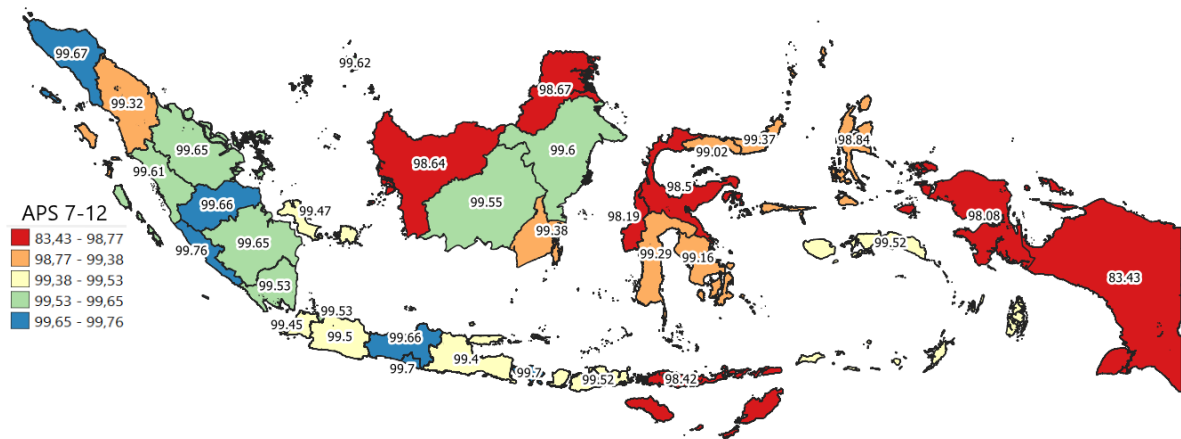
AKS dari tahun 2016-2020 menunjukkan pertumbuhan positif menandakan kesadaran orang tua tentang pentingnya PAUD untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Mengingat lembaga PAUD yang ada masih didominasi oleh satuan pendidikan berbasis masyarakat, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen terus mendorong kebijakan pertumbuhan lembaga PAUD tersebut, yang fokus untuk mempersiapkan anak masuk SD. Selain itu, kebijakan tersebut juga difokuskan pada daerah-daerah dengan AKS yang masih rendah untuk mendukung percepatan pencapaian satu desa satu PAUD.

Gambar 3: Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SD dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun 2015-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015-2021

Gambar 4: Sebaran Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun 2021

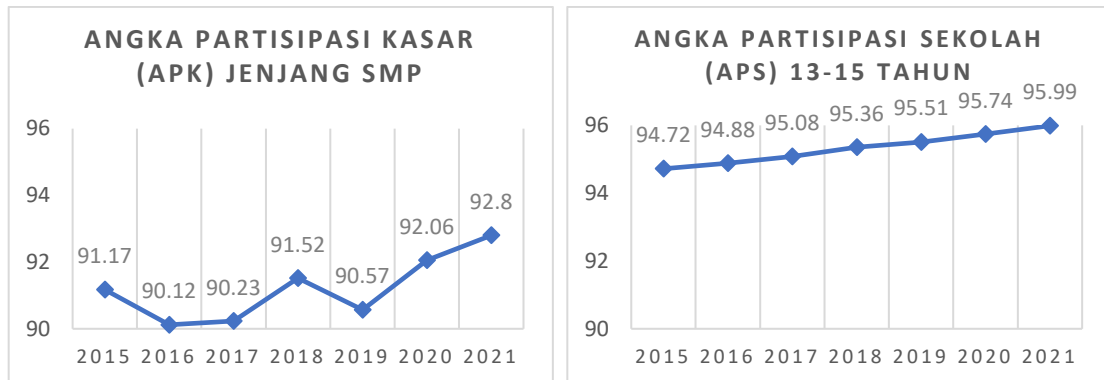


Sumber : Badan Pusat Statistik 2021

Berbeda dengan APK PAUD, APK SD dari tahun 2015-2021 mengalami penurunan. Salah satu penyebab penurunan APK ini adalah berkurangnya siswa baru kelas satu SD yang berusia di bawah tujuh tahun akibat berkembangnya layanan PAUD. Oleh karena itu, penggunaan APK sebagai indikator keberhasilan akses untuk SD perlu dipertimbangkan kembali. Alternatif indikator akses SD adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun. Setelah melihat capaian APS pada 2021 telah mencapai 99,19%, dapat disimpulkan bahwa hampir semua anak usia 7-12 tahun telah mengenyam pendidikan atau berada di bangku sekolah.

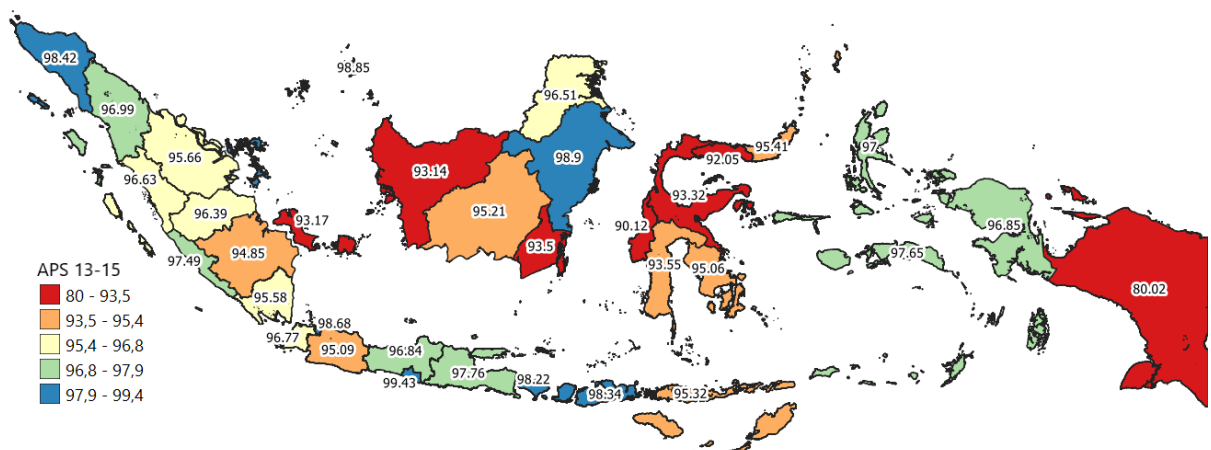
Selanjutnya, untuk mengoptimalkan APS agar mendekati 100 persen, perlu diperkuat dukungan terhadap pendidikan khusus inklusi bagi anak berkebutuhan khusus serta layanan khusus bagi anak-anak dalam kondisi khusus seperti anak rimba, anak nelayan, dan anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan pertimbangan sebaran APS usia 7-12 tahun per provinsi, perhatian khusus perlu diberikan kepada Provinsi Papua yang capaian APS-nya sebesar 83,43%. Strategi khusus perlu dikembangkan untuk memastikan bahwa APS usia 7-12 tahun di Provinsi Papua agar mendekati rata-rata nasional.

Gambar 5: Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMP dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun 2015-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik 2015-2021

Gambar 6: Sebaran Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun 2021

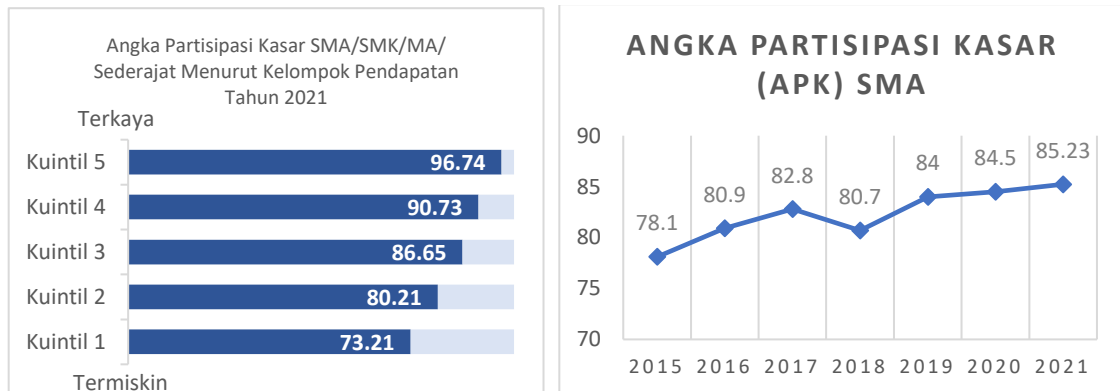


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Sama halnya dengan APK SD, pola penurunan juga terjadi pada APK SMP, sehingga pengukuran ketercapaian akses pada jenjang SMP/Sederajat akan lebih akurat apabila menggunakan APS usia 13-15 tahun. Pada periode tahun 2015-2021, APS usia 13-15 mengalami peningkatan dari 94,72% menjadi 95,99%. Capaian APS tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar anak usia 13-15 tahun telah mengenyam pendidikan. Namun, karena masih terdapat 4,01% anak usia 13-15 tahun yang belum mengenyam pendidikan perlu dipertimbangkan daerah-daerah yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan pada jenjang usia tersebut. Hal ini diperkuat dengan adanya disparitas antarkondisi kelompok ekonomi, khususnya penduduk pada kelompok termiskin.

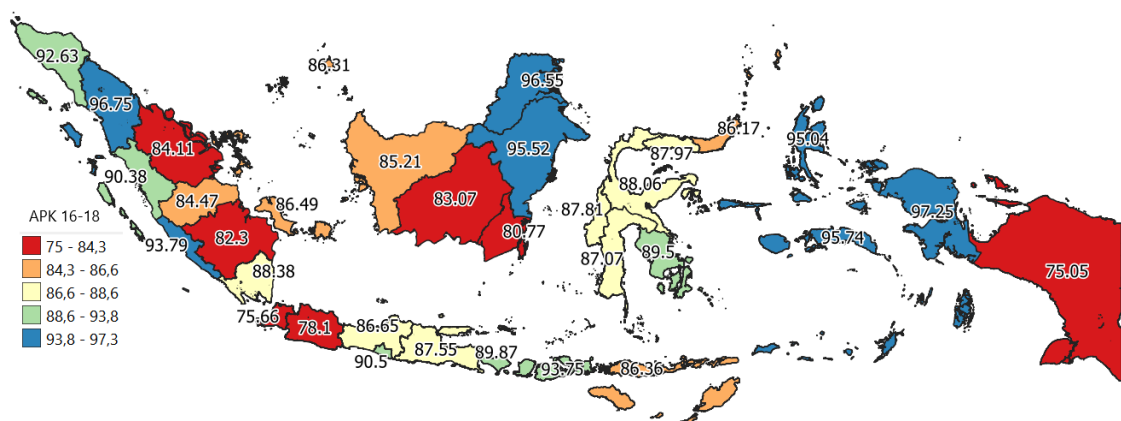
Selain dukungan terhadap kelompok ekonomi termiskin, dukungan terhadap pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus serta layanan khusus bagi anak-anak dalam kondisi khusus seperti: anak rimba, anak nelayan, dan anak yang berkonflik dengan hukum, juga perlu diperkuat.

Gambar 7: Capaian Angka Partisipasi Kasar SMA/Sederajat Berdasarkan Kelompok Ekonomi Tahun 2021 dan Angka Partisipasi Kasar SMA/Sederajat Tahun 2015-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015-2021

Gambar 8: Sebaran Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMA Tahun 2021 per Provinsi



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015-2021

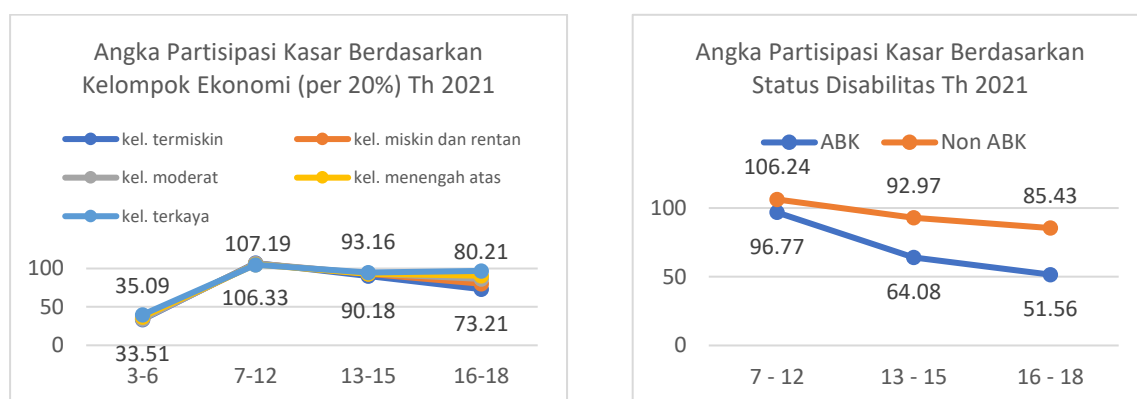
Berbeda dengan jenjang pendidikan lainnya, tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang SMA/Sederajat masih jauh dari nilai ketuntasan. Oleh karena itu, penggunaan APK untuk mengukur akses pendidikan menengah masih relevan. Meskipun terjadi peningkatan APK pada periode tahun 2015 s.d tahun 2021, capaian pada tahun 2021 masih sebesar 85,23% Terlebih jika melihat kesenjangan pada kelompok ekonomi, terdapat selisih 23,53% antara kelompok ekonomi termiskin dan terkaya. Data ini menunjukkan bahwa masih ada satu dari empat anak kelompok ekonomi termiskin yang belum mendapatkan layanan pendidikan menengah.

Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen perlu memprioritaskan dukungan pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau atau terbatas layanannya. Layanan SMA/SMK satu atap dapat dipertimbangkan untuk melayani daerah dengan jumlah anak usia

pendidikan menengah yang terbatas. Penetapan target Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang lebih baik juga menjadi salah satu fokus guna memastikan anak-anak dari kelompok ekonomi termiskin dapat tetap bersekolah.

2. Isu Partisipasi Pendidikan Lintas Sektor

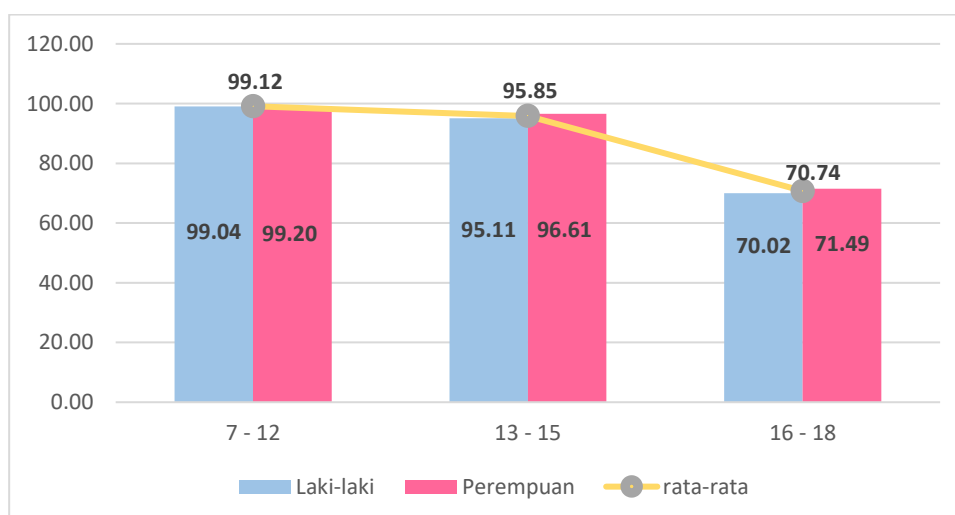
Gambar 9: Capaian Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Kelompok Ekonomi dan Status Disabilitas Tahun 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Berdasarkan kelompok ekonomi, capaian APS usia 7-12 tahun menunjukkan perbedaan tipis, hanya terpaut 0,86%, tetapi semakin melebar menjadi 7,00% pada usia 16-18 tahun. Sementara itu, selisih capaian APK usia 7-12 tahun antara ABK dan bukan ABK sudah mendekati 9,47% dan 33,87% pada APK 16-18 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ABK bila mencapai jenjang SMA/Sederajat lebih besar probabilitasnya untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.

Gambar 10: Capaian Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Gender Tahun 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

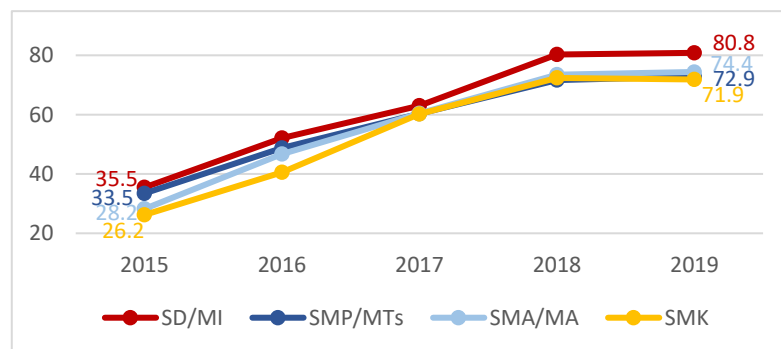
Selain berdasarkan kelompok ekonomi, angka partisipasi pendidikan juga dipengaruhi oleh faktor gender dan disabilitas. Capaian APK berdasarkan gender menunjukkan bahwa anak perempuan memiliki probabilitas sedikit lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki, meskipun perbedaan antara keduanya tidak pernah melebihi dua persen. Perbedaan ini jauh lebih kecil dibandingkan perbedaan antarkelompok ekonomi dan perbedaan antara anak berkebutuhan khusus (ABK) dan bukan ABK

Mempertimbangkan capaian isu lintas sektor ini, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen menyelenggarakan program afirmasi untuk menyasar kelompok ekonomi termiskin dan juga ABK. Program afirmasi bagi kelompok ekonomi termiskin berupa dukungan pembiayaan pendidikan seperti afirmasi pendidikan menengah (ADEM). Sementara itu program afirmasi untuk ABK dapat berupa penyelenggaraan pendidikan inklusi dan pendidikan luar biasa.

3. Mutu

Dalam rangka mengukur capaian mutu pada periode tahun 2020-2024, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen menggunakan alat ukur yaitu akreditasi hasil capaian jangka menengah periode sebelumnya 2015-2019, asesmen nasional serta nilai hasil uji *Programme for International Student Assessment* (PISA) tahun 2018.

Gambar 11: Persentase Sekolah dengan Akreditasi Minimal B Tahun 2015-2019



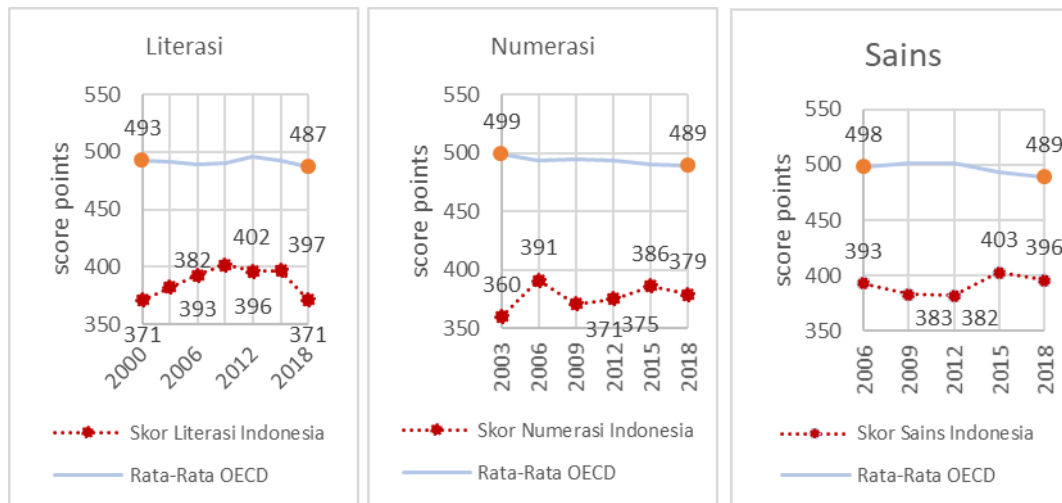
Sumber: BAN-S/M, 2015-2019

Akreditasi mengukur bagaimana satuan pendidikan memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Selama periode sebelumnya tahun 2015-2019, jumlah satuan pendidikan terakreditasi minimal B di seluruh jenjang meningkat rata-rata 44,20%. Jenjang SD/MI merupakan jenjang dengan akreditasi minimal B terbanyak. Namun, apabila memperhatikan peningkatan akreditasi minimal B pada jenjang pendidikan menengah, jenjang SMK merupakan yang terendah dan jenjang SMA/MA mengalami peningkatan tertinggi.

Uji PISA adalah instrumen asesmen capaian pendidikan yang dikembangkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk mengukur capaian belajar siswa usia 15 tahun di bidang literasi, numerasi, dan sains. Melihat

perkembangan uji PISA dari tahun 2000-2018, capaian nilai PISA Indonesia masih jauh di bawah rata-rata negara anggota OECD.

Gambar 12: Capaian Skor PISA Indonesia Tahun 2000-2018

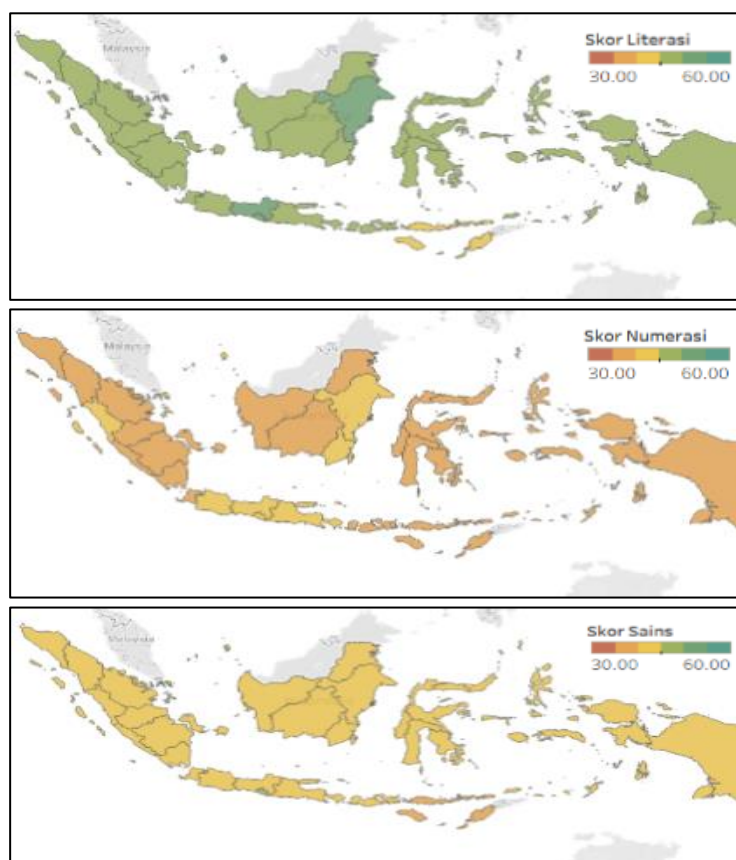


Sumber: OECD 2019

Meskipun capaian skor literasi PISA Indonesia telah mengalami peningkatan sejak tahun 2000 dari 371 menjadi 402 pada tahun 2009, di tahun 2018 skor literasi PISA Indonesia kembali turun menjadi 371. Skor numerasi PISA Indonesia juga menunjukkan pola yang sama, pada tahun 2003-2006 meningkat dan kembali turun (menjadi 371) pada tahun 2009. Skor numerasi PISA Indonesia masih cenderung positif. Sementara itu, skor sains PISA Indonesia yang sempat menurun pada tahun 2009 dan 2012 memiliki tren yang relatif positif. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, capaian belajar siswa belum memperlihatkan peningkatan yang signifikan. Meskipun demikian, OECD menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tren skor PISA yang positif.

Untuk melihat capaian hasil belajar siswa antar wilayah di Indonesia, Kemendikbudristek menggunakan nilai Asesmen Nasional (AN). Dengan memperhatikan skor periode sebelumnya yang menggunakan Ujian Nasional (UN) dan Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI), AKSI SMP tahun 2019 per provinsi pada grafik spasial skor literasi, numerasi, dan sains, terlihat adanya disparitas capaian antarwilayah. Beberapa daerah seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Kalimantan Timur memiliki capaian yang lebih tinggi dibanding provinsi-provinsi lain.

Gambar 13: Sebaran Capaian Skor AKSI SMP per Provinsi Tahun 2019



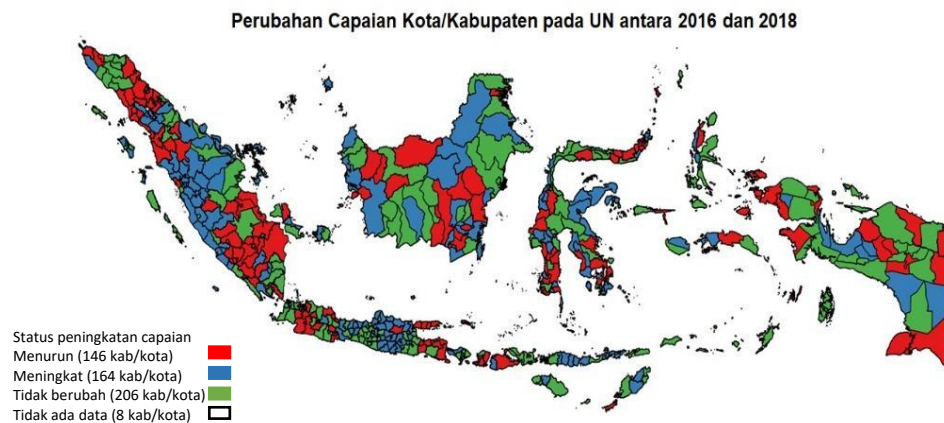
Sumber: Puspendik, 2019

Capaian skor PISA dan AKSI yang belum signifikan tersebut disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah desain kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan belum secara khusus menekankan pada pengembangan kompetensi dasar yaitu literasi, numerasi dan sains. Sebagai contoh, mekanisme kurikulum di SD yang menggunakan pendekatan tematik kurang menyediakan ruang yang memadai bagi guru untuk pengembangan kompetensi literasi, terutama di kelas awal. Contoh lainnya adalah pada mata pelajaran matematika yang lebih menekankan penguasaan

rumus-rumus, formula dan teori matematika daripada penggunaan numerasi di dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, penyempurnaan strategi penilaian hasil belajar yang lebih berfokus pada kompetensi dasar literasi, numerasi, dan sains akan mendorong satuan pendidikan agar lebih fokus pada peningkatan kompetensi dasar dan kualitas satuan pendidikan, termasuk sistem pendidikan di daerah, agar dapat diukur dengan kebijakan asesmen atau penilaian yang tepat.

Gambar 14: Perubahan Capaian Kota/Kabupaten pada UN antara Tahun 2016 dan 2018



Sumber : SMERU, 2021

Gambar 12 merepresentasikan grafik spasial sebaran perubahan nilai UN antara tahun 2016 dan 2018 yang menunjukkan bahwa 40 persen kabupaten/kota tidak mengalami perubahan nilai UN yang signifikan. Peningkatan hasil UN terjadi pada 164 kabupaten/kota dan penurunan terjadi pada 146 kabupaten/kota.

Beberapa daerah menunjukkan peningkatan hasil UN yang tidak selaras dengan peningkatan jumlah satuan pendidikan dengan akreditasi minimal B. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut adalah sebaran satuan pendidikan yang mengalami peningkatan akreditasi yang belum merata antarwilayah, peningkatan hasil UN yang disebabkan oleh faktor di luar satuan pendidikan atau akreditasi yang belum dapat mengukur dengan baik faktor-faktor kunci yang berdampak pada capaian pembelajaran.

Bila melihat kembali peningkatan yang terjadi pada 164 kabupaten/kota, dapat diketahui bahwa peningkatan terjadi cukup merata di seluruh wilayah Indonesia, dengan sebaran paling banyak di pulau Kalimantan (37,5%). Berdasarkan capaian tersebut, peningkatan hasil belajar siswa bukan hanya terjadi di pulau Jawa, melainkan juga merata di seluruh wilayah di Indonesia, walau dengan derajat peningkatan yang berbeda-beda.

Pada tahun 2021 dilaksanakan program Asesmen Nasional (AN) sebagai upaya perbaikan program UN, AN lebih fokus pada kompetensi dasar literasi, numerasi, dan sains. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan mengevaluasi kinerja satuan pendidikan dan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar-mengajar, yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa

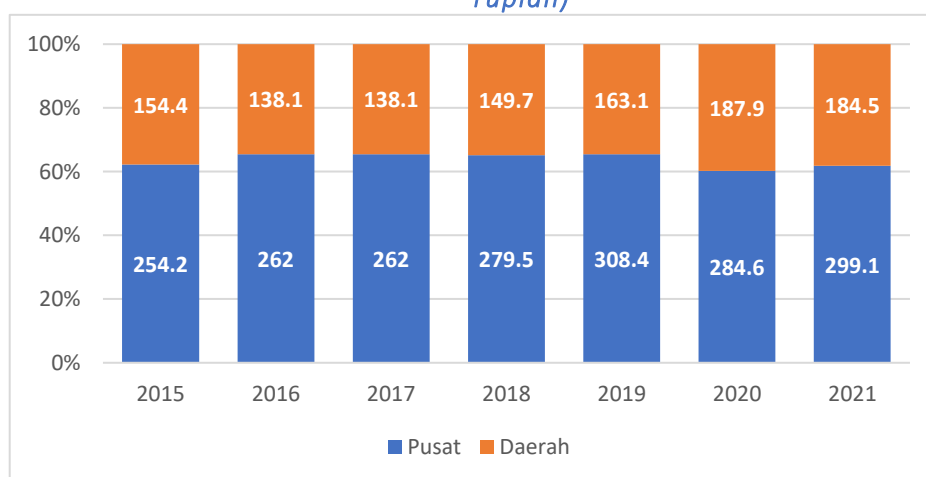
Kemendikbudristek melalui Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen juga berupaya mengembangkan strategi untuk menemukan praktik-praktik dari pemerintah daerah yang menunjukkan peningkatan untuk kemudian dapat diadopsi dan diadaptasi oleh daerah lain sesuai dengan konteks dan kebutuhan tiap-tiap daerah.

4. Tata Kelola

Salah satu hal kunci dalam tata kelola pendidikan adalah bahwa urusan pendidikan merupakan salah satu urusan yang kewenangannya dilimpahkan ke daerah. Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke 4 mengamanatkan bahwa 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk pendidikan, untuk saat ini lebih dari 60% anggaran pendidikan tersebut merupakan anggaran yang dikelola oleh daerah.

Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen sebagai bagian dari kementerian teknis di bidang pendidikan terus mengembangkan mekanisme tata kelola untuk meyakinkan daerah agar menggunakan anggaran pendidikan yang dikelolanya untuk mendukung program prioritas pemerintah.

Gambar 15: Anggaran Pendidikan Pusat dan Daerah Tahun 2015-2021 (triliun rupiah)



Sumber: Perpres Tentang Rincian APBN, 2015-2021

Terdapat berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk mengelola dana transfer ke daerah, diantaranya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dikelola sebagai *unconditional* transfer untuk menutup kesenjangan kapasitas fiskal daerah. Untuk DAU pendidikan, sebagian besar dana ($\pm 80\%$) digunakan untuk belanja gaji bagi guru, tenaga pendidikan, serta aparat organisasi perangkat daerah di bidang pendidikan. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan pusat untuk mempengaruhi daerah dalam mengelola pembelanjaan DAU.

Oleh karena itu digunakan Kebijakan DAK untuk mengendalikan belanja pendidikan di daerah. DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Kebijakan DAK dibagi menjadi dua yaitu DAK fisik dan DAK non fisik. DAK fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan bersesuaian dengan program prioritas nasional seperti rehabilitasi, penambahan fasilitas, dan pembelian aset pendukung pembelajaran. Sementara itu, DAK non fisik digunakan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOP PAUD/Kesetaraan.

Selanjutnya, untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen juga menerapkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mencakup delapan area, yakni manajemen perubahan, penataan peraturan perundangan/deregulasi kebijakan, penataan organisasi/kelembagaan, penataan tatalaksana, sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, pengawasan, serta pelayanan publik.

Salah satu potensi untuk meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi dan layanan publik Kemendikbudristek dapat dilakukan dengan mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi tata kelola, seperti: otomatisasi persuratan, pengadaan barang dan jasa, dan proses kepegawaian, serta penguatan layanan publik melalui ULT untuk mengkomodasi layanan informasi dan pengaduan.

Selain Indeks Reformasi Birokrasi, tingkat capaian reformasi birokrasi juga didukung dengan bertambahnya unit kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI/WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sampai dengan tahun 2021, terdapat 18 Satker dengan predikat ZI-WBK pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Capaian itu tidak lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu (1) sosialisasi dan fasilitasi terkait peningkatan delapan area perubahan kepada seluruh Satker serta pendampingan pembangunan ZI-WBK/WBBM, (2) fasilitasi pelayanan prima bagi petugas pemberi pelayanan publik, serta (3) penguatan agen perubahan melalui penyelenggaraan forum agen perubahan secara berkala, pelaksanaan rencana aksi agen perubahan di unit kerja terkait.

Sementara sebagai sistem pertanggungjawaban kinerja secara keseluruhan maka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) juga dilaksanakan mulai dari tingkat eselon 1, eselon 2, hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai pemenuhan akuntabilitas satuan kerja pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pada tahun anggaran berjalan.

Yang dimaksud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai komponen, alat, dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja yaitu perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan laporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja.

Tujuan dari pelaksanaan SAKIP adalah:

1. Perencanaan lebih berorientasi kinerja dengan skenario evaluasi keberhasilan;
2. Pelaporan lebih berorientasi pada hasil dan sesuai tanggung jawab pada tingkatan unit pelapor;
3. Menyelaraskan dan pengintegrasian manajemen keuangan dan manajemen kinerja (penganggaran berbasis kinerja);
4. Mendorong pimpinan melakukan monitoring dan pengendalian.

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, tingkat penerapan akuntabilitas kinerja SAKIP tahun 2021, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen masuk dalam kategori A (rentang predikat terbaik AA s.d terbawah predikat D) nilai: 85,11 dengan interpretasi: memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel. Sementara untuk satker-satker di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen sebesar 48,57% telah mendapatkan predikat A.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

A. Visi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Sebagai Direktorat Jenderal yang mengemban amanat dalam memajukan pembangunan SDM khususnya pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, melalui usaha bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan, memajukan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen menentukan visi berdasarkan visi Kemdikbudristek, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045 dalam pencapaian kinerja, potensi dan permasalahan. Adapun Visi Kemdikbudristek 2020-2024 adalah:

Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global

Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kemdikbudristek mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kemdikbudristek dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden tersebut.

B. Dukungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kemdikbudristek sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai arahan presiden, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kemdikbudristek dalam melaksanakan Nawacita kedua arahan presiden (RPJMN) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah.

C. Tujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Perumusan tujuan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kemdikbudristek ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen menetapkan tiga tujuan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 1: Tujuan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen tahun 2020-2024

No.	Tujuan
1.	Perluasan akses pendidikan bermutu Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
2.	Penguatan mutu dan relevansi pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang berpusat pada perkembangan peserta didik yang berkarakter
3.	Penguatan sistem tata kelola pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

D. Sasaran Program Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, diperlukan sejumlah Sasaran Program (SP) yang akan dicapai pada tahun 2020-2024.

Tabel 2: Program dan Sasaran Program (SP) Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Tahun 2020-2024

No	Tujuan Kemdikbudristek	Sasaran Strategis (SS)	Program	Sasaran Program (SP)
1	Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah
2	Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang	Program Kualitas Pengajaran & Pembelajaran	1. Meningkatkan pencapaian perkembangan anak 2. Meningkatkan nilai asesmen kompetensi (literasi dan numerasi) satuan pendidikan 3. Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran 4. Meningkatkan internalisasi nilai penguatan karakter
3	Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Program Dukungan Manajemen	1. Meningkatkan akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi 2. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi Kemdikbudristek

E. Perspektif Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi

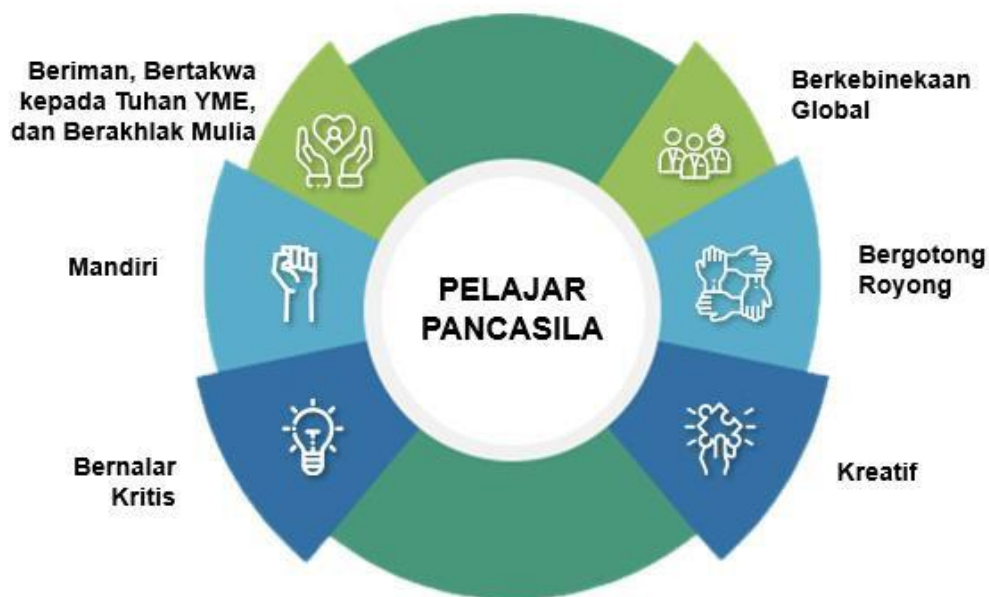
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen sebagai bagian dari Kemdikbudristek perlu menyusun arah kebijakan,

strategi, serta program dan kegiatan yang selaras. Oleh karena itu, dokumen Renstra menyajikan dua perspektif dalam pencapaiannya.

1. Perspektif Tujuan (Profil Pelajar Pancasila)

Profil Pelajar Pancasila sebagai elaborasi tujuan pendidikan nasional adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif seperti ditunjukkan oleh Gambar 16

Gambar 16: Dimensi-Dimensi Profil Pelajar Pancasila



Enam ciri tersebut menunjukkan bahwa Profil Pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif saja tetapi juga pada sikap dan perilaku yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia dan berkewargaan global

2. Perspektif Cara (Merdeka Belajar)

Bapak pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara, menyatakan bahwa paradigma pendidikan yang memerdekakan memiliki 3 (tiga) ciri yaitu:

a. Tidak Hidup Terperintah

Peserta didik belajar dengan kesadaran dari dalam diri sendiri, bukan karena paksaan atau perintah orang lain.

b. Berdiri Tegak karena Kekuatan Sendiri

Peserta didik berdiri tegak karena kekuatan sendiri dan mampu menemukan cara dalam mengatasi kesulitan belajar.

c. Cakap Mengatur Hidupnya dengan Tertib

Peserta didik mampu menilai tindakan dan kemajuan belajarnya sehingga dapat melakukan perbaikan untuk mencapai tujuan belajar.

Pada hakikatnya gagasan Ki Hadjar Dewantara yang kemudian disebut sebagai Merdeka Belajar, sejalan dengan konsep *self regulated learning* yang telah dikaji oleh beberapa ahli seperti Zimmerman; Boekaerts, Winne dan Hadwin, Pintrich; Efklides, serta Hadwin, Järvelä dan Miller (Panadero, 2017). *Self regulated learning* adalah keyakinan seseorang terhadap kapasitas dirinya dalam menentukan tindakan, pikiran dan perasaan yang mengarah pada pencapaian tujuan, sembari melakukan monitoring diri dan refleksi diri terhadap kemajuan dalam mencapai target.

Merdeka belajar menjadi semangat yang menjiwai keseluruhan arah kebijakan dan strategi bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Semangat merdeka belajar berarti menekankan murid, guru, orang tua, satuan pendidikan, daerah, komunitas pendidikan, yayasan pendidikan, dunia usaha, dan dunia industri serta pelaku pendidikan lainnya sebagai aktor yang otonom dan berdaya. Pelaku pendidikan berdaya mengembangkan praktik-praktik baik pembelajaran, manajemen pendidikan, dan kepemimpinan pendidikan yang perlu diperkuat dan ditularkan ke seluruh ekosistem pendidikan sehingga membentuk pembelajaran yang berkualitas.

Semangat merdeka belajar, membentuk lima pergeseran paradigma dalam kepemimpinan dan pengelolaan pendidikan, yaitu sebagai berikut:

- a. **Semula mekanisme kontrol menjadi pemberdayaan melalui umpan balik.** Mekanisme kontrol terbukti tidak selalu efektif serta dapat menimbulkan tekanan dan orientasi yang keliru. Dalam ekosistem yang berdampak, umpan balik yang berkelanjutan menjadikan semua pihak lebih berdaya.
- b. **Semula arahan menjadi penguatan praktik baik di lapangan.** Kepemimpinan pendidikan dengan semangat merdeka belajar tidak menjadikan instruksi sebagai satu-satunya bentuk komunikasi, akan tetapi kepemimpinan yang mendengarkan, memahami, dan mengenali praktik baik di lapangan. Upaya penguatan praktik baik akan menumbuhkan kepercayaan diri dan inisiatif pelaku pendidikan melakukan inovasi pembelajaran dan pendidikan.
- c. **Semula apresiasi hanya bagi yang terbaik menjadi bagi semua kemajuan.** Apresiasi hanya bagi yang terbaik dapat menimbulkan demotivasi bagi mereka yang merasa tidak berdaya. Semangat merdeka belajar mendorong pengelolaan pendidikan yang mengapresiasi semua kemajuan yang terjadi, bahkan untuk kemajuan kecil oleh satuan pendidikan kecil yang masih berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan semangat merdeka belajar ini, pelaku dalam ekosistem pendidikan akan lebih aktif dan lebih merasa berdaya, di manapun posisinya saat ini.
- d. **Semula kompetisi menjadi kolaborasi untuk kemajuan bersama.** Semangat merdeka belajar tanpa meninggalkan kompetisi, tapi lebih menonjolkan nilai-nilai gotong royong dalam bentuk kolaborasi antarpihak. Dengan kolaborasi, akan lebih banyak energi dan dukungan bagi semua pelaku untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab satu dua pihak tapi tanggung jawab bersama demi masa depan anak bangsa.
- e. **Semula berfokus pada peningkatan akses menjadi peningkatan kualitas dan keadilan pendidikan.** Semangat merdeka belajar memperluas fokus pembangunan pendidikan pada peningkatan kualitas dan keadilan pendidikan. Hal ini mendorong lebih banyak kebijakan afirmatif dan asimetris untuk memastikan semua anak mendapatkan pembelajaran yang berkualitas.

Semangat merdeka belajar pada akhirnya selaras dengan arah kebijakan nasional yang terkait dengan otonomi daerah, otonomi kampus, dan manajemen berbasis sekolah. Semangat merdeka belajar mendorong penguatan semua pihak untuk menjadi otonom sehingga bisa mencapai tujuan pendidikan nasional dengan berpijak pada konteks satuan pendidikan dan daerah masing-masing

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah kebijakan dan Strategi

Pembangunan pendidikan dasar dan menengah disusun berdasarkan dan merujuk kepada arah kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah (RPPJM), Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, serta hasil evaluasi Renstra tahun 2015-2019, yang kemudian dituangkan dalam perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2020-2024. Renstra Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen menjadi dasar, pedoman, acuan dalam penyusunan program dan selanjutnya dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan pembangunan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Rujukan-rujukan utama ini secara konsisten harus dapat dicermati, dianalisis dan dipertajam ke dalam Renstra PAUD, Dikdas, dan Dikmen agar tidak keliru dan dapat optimal dalam teknis pelaksanaannya sampai kepada pengelola kegiatan, dan juga output-output yang menjadi ujung tombak bagi pencapaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program.

1. Arah dan Kebijakan Strategi Nasional

Pembangunan akan berjalan efektif bila perencanaan Kementerian dan Lembaga dapat saling mendukung dan selaras. Untuk itu, Rencana Strategis Kemendikbudristek harus selalu mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2020-2024.

Dalam RPJMN 2020-2024, arah kebijakan dan strategi nasional dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) agenda Pembangunan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;

- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
- 7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari ketujuh agenda tersebut, Kemdikbudristek memberikan dukungan pada agenda pembangunan 3, 4 dan 7.

2. Arah dan Kebijakan Strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Penunjang Strategi Nasional

Arah kebijakan, strategi, dan program Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang mendukung Strategi Nasional pada agenda pembangunan 3,4 dan 7 adalah sebagai berikut:

a. Agenda Pembangunan 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Pembangunan Indonesia tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Kebijakan dan strategi yang berkaitan langsung dengan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen sebagai berikut:

Tabel 3: Kebijakan dan Strategi Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

No	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis	Sasaran Program
	Meningkatkan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas		
1	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran	SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang	SP 1 Meningkatnya pencapaian perkembangan anak SP 2 Meningkatnya nilai asesmen kompetensi (literasi dan numerasi) satuan pendidikan SP 3 Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter
2	Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun	SS 1 Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	SP 5 Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah
3	Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antarwilayah	SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang	SP 4 Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran

No	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis	Sasaran Program
4	Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan	SS 5 Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	SP 6 Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi
			SP 7 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek

b. Agenda Pembangunan 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan harus pula meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman: Bhinneka Tunggal Ika. Untuk memperkuat Bhinneka Tunggal Ika, kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial kemasyarakatan. Kebijakan dan strategi nasional yang berkaitan langsung dengan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel 4: Kebijakan dan Strategi Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

No	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis	Sasaran Program
A	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter		
1	Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti	SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang	SP 1 Meningkatnya pencapaian perkembangan anak
			SP 3 Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter
2	Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif	SS 5 Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	SP 1 Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi
			SP 2 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek

No	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis	Sasaran Program
3	Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme	SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang	SP 3 Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter
B	Peningkatan Literasi, Inovasi, dan Kreativitas		
1	Peningkatan budaya literasi	SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang	SP 2 Meningkatnya nilai asesmen kompetensi (literasi dan numerasi) satuan pendidikan
2	Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi	SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang	SP 4 Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran

c. Agenda Pembangunan 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian diperlukan aparatur negara yang profesional dan berintegritas tinggi melalui penerapan sistem merit yang sangat baik, penguatan kelembagaan melalui optimalisasi proses bisnis dan reformasi sistem akuntabilitas kinerja, serta transformasi pelayanan publik yang diwujudkan melalui strategi berikut:

Tabel 5: Kebijakan dan Strategi Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola

No	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis	Sasaran Program
	Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola		
1	Penguatan manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta ASN, peningkatan penerapan Manajemen SDM berbasis sistem merit, dan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional pada Kemendikbudristek	SS 5 Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	SP 7 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek
2	Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi	SS 5 Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	SP 7 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek

No	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis	Sasaran Program
3	Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran	SS 5 Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	SP 6 Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi
			SP 7 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek
4	Transformasi pelayanan publik, melalui: pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu	SS 5 Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	SP 6 Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi

3. Arah dan Kebijakan Strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Penunjang Strategi Kemdikbudristek

Arah kebijakan, strategi, dan program Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang mendukung Strategi Kemdikbudristek adalah sebagai berikut:

a. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka optimalisasi angka partisipasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah adalah semua anak usia sekolah dan prasekolah mendapatkan layanan pendidikan.

Strategi Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen untuk mencapai kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

Semua anak Usia Sekolah dan Prasekolah mendapatkan Layanan Pendidikan

- 1) Meningkatkan pemerataan layanan PAUD dengan mendorong tumbuhnya satuan PAUD berkualitas baik melalui pemberian BOP PAUD bagi keluarga yang tidak mampu, Kebijakan SPM, maupun swadaya masyarakat, untuk mendorong tersedianya satu desa satu PAUD;
- 2) Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan SD kepada anak berkebutuhan khusus melalui penyelenggaraan sekolah inklusi;
- 3) Meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh layanan SMP melalui peningkatan kapasitas terpasang bagi daerah yang belum terlayani dan penyelenggaraan sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus;

- 4) Meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh layanan SMA melalui peningkatan kapasitas terpasang bagi daerah yang belum terlayani dan penyelenggaraan sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus;
- 5) Program afirmasi pemerataan kesempatan memperoleh layanan SMA dan SMK untuk daerah 3T melalui pembangunan SMA/SMK satu atap atau layanan sekolah berasrama untuk melayani daerah yang tidak mungkin dibangun sekolah;
- 6) Menyediakan dukungan pendidikan nonformal sebagai alternatif layanan pembelajaran bagi peserta didik yang memilih mengenyam pendidikan di luar satuan pendidikan formal;
- 7) Perluasan layanan pendidikan khusus untuk memberikan layanan bagi anak berkebutuhan khusus yang tidak dapat dilayani oleh satuan pendidikan reguler dan inklusi.
- 8) Melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat untuk dapat menemukan anak-anak yang tidak bersekolah; dan
- 9) Menyediakan dukungan pembiayaan pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu dan di daerah afirmasi di jenjang pendidikan dasar dan menengah.

b. Peningkatan dan Pemerataan Kualitas dan Relevansi Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan dan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Pelajar dengan kemampuan kognitif baik yang berperilaku sesuai jati diri bangsa Indonesia dan berkewargaan global;
- 2) Sistem penjaminan mutu pendidikan yang berkualitas.

Strategi Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen untuk mencapai kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pelajar dengan kemampuan kognitif baik yang berperilaku sesuai jati diri bangsa Indonesia dan berkewargaan global.
 - a) Mendorong pertumbuhan satuan PAUD yang menerapkan layanan PAUD holistik integratif;
 - b) Melaksanakan program sekolah penggerak sebagai motor perubahan praktik pembelajaran;
 - c) Menyempurnakan kurikulum dan perangkat kurikulum memberikan ruang bagi satuan pendidikan untuk mengadaptasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan, konteks, dan karakteristik daerah, sekolah, dan siswa;
 - d) Mengembangkan strategi pembelajaran yang berfokus pada penguatan kompetensi dasar siswa, seperti literasi, numerasi, dan karakter;
 - e) Menerapkan pembelajaran paradigma baru pada semua satuan pendidikan melalui pengimbasan sekolah penggerak ataupun penerapan secara mandiri;

- f) Memperkuat digitalisasi pendidikan untuk mengakselerasi transformasi pendidikan, meningkatkan efisiensi serta meningkatkan literasi digital siswa dan guru;
- g) Memperkuat pembelajaran yang mendorong penguatan karakter di semua satuan pendidikan;
- h) Mengembangkan program penguatan iklim keamanan sekolah, inklusivitas, dan kebinekaan satuan pendidikan;
- i) Memfasilitasi siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan membangun karier sesuai dengan bidangnya; dan
- j) Melakukan pembinaan minat dan bakat bagi siswa berprestasi.

2) Sistem penjaminan mutu pendidikan yang berkualitas

- a) Menerapkan asesmen nasional (Asesmen Kompetensi Minimum [AKM], survei karakter, dan survei lingkungan belajar) sebagai instrumen dalam mengukur kualitas hasil belajar;
- b) Mengembangkan profil dan rapor pendidikan di tingkat daerah dan satuan pendidikan dengan menggunakan asesmen nasional dan data pendidikan;
- c) Menguatkan pemanfaatan profil dan rapor pendidikan untuk mendukung penjaminan mutu dan akreditasi otomatis; dan
- d) Menyusun rekomendasi kebijakan yang berbasis pada analisis data dan meta analisis dari berbagai bukti ilmiah untuk secara bertahap dan berkelanjutan menyempurnakan Standar Nasional Pendidikan untuk menangani isu pembangunan pendidikan di Indonesia.

c. Tata Kelola Pendidikan yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel

Kondisi yang ingin dicapai dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah sebagai berikut:

- 1) Tata Kelola Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang akuntabel dan berkualitas;
Strategi Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen untuk mencapai kondisi tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) Penyempurnaan kerangka regulasi bidang pendidikan untuk memperkuat fokus pada mutu dan relevansi pendidikan serta penguatan otonomi satuan pendidikan;
 - b) Memperkuat mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada monitoring pelaksanaan dan evaluasi dampak program;
 - c) Memperkuat kerja sama dan sinkronisasi kebijakan pendidikan dengan kementerian/lembaga di pusat dan pemerintah daerah;

- d) Penguatan sistem pengawasan internal untuk meningkatkan kepatuhan dan integritas terhadap peraturan perundang-undangan;
 - e) Memperkuat mekanisme pengelolaan dana transfer daerah bidang pendidikan yang lebih terkoordinasi dengan baik;
 - f) Mengembangkan mekanisme pengelolaan sumber daya manusia Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang berbasis mekanisme manajemen talenta
- 2) Pelayanan Publik yang Prima

Strategi Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen untuk mencapai kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi tata kelola seperti: otomatisasi persuratan, pengadaan barang dan jasa, dan proses kepegawaian;
- b) Memperkuat pengelolaan pembiayaan pendidikan untuk memaksimalkan kontribusi pembiayaan dalam pencapaian sasaran pendidikan di bidang akses dan mutu;
- c) Mengembangkan kerja sama dengan sektor swasta, masyarakat, dan mitra pembangunan untuk menumbuhkan penguatan pendanaan pendidikan.

4. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis, beberapa rancangan regulasi yang diprioritaskan sesuai bidang tugas Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen pada periode waktu tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 6: Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
1.	Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan pendidikan serta sinkronisasi dengan peraturan perundang undangan lain antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu: 1. Penataan kembali jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini 2. Direktorat Sekolah Dasar 3. Direktorat Sekolah Menengah Pertama 4. Direktorat Sekolah Menengah Atas 5. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
		2. Pembagian wewenang penyelenggaraan pengelolaan pendidikan. 3. Konsep kebebasan dalam menentukan minat pembelajaran (merdeka belajar dan kampus merdeka). 4. Standar pendidikan. 5. Wajib Belajar 12 tahun. 6. Konsep kebebasan terkait pilihan proses pembelajaran (tatap muka/ <i>online</i>). 7. Kurikulum, guru, asesmen pembelajaran, pendidikan kesetaraan, penyelenggaraan pendidikan oleh negara asing.			
2.	Perubahan PP No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan	1. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak	1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini	Tahun 2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
		Pendidikan Nasional tersebut, secara eksplisit memastikan kembali bahwa mandat pendanaan pendidikan dalam Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 terlaksana oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan pendanaan pendidikan dimaksud merupakan upaya negara dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam bagian pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Melakukan pengawasan secara teknis dari menteri sebagai bentuk kontrol pemerintah pusat terkait	Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	2. Direktorat Sekolah Dasar 3. Direktorat Sekolah Menengah Pertama 4. Direktorat Sekolah Menengah Atas 5. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
		untuk menjamin keterlaksanaan pengalokasian dan penyaluran anggaran pendidikan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimandatkan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.			
3.	Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	1. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan agar lebih efektif dan efisien.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini 2. Direktorat Sekolah Dasar 3. Direktorat Sekolah	Tahun 2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
		2. Mengakomodasikan berbagai perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat yang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. 3. Praksis pelaksanaan PP Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010 dipandang belum memadai untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 4. Ruang lingkup pengaturan: a. Mengubah syarat usia calon peserta didik baru pada SD/MI dan SMP/MTs atau bentuk pendidikan formal lainnya yang sederajat;		Menengah Pertama 4. Direktorat Sekolah Menengah Atas 5. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
		b. Penghapusan syarat hasil ujian nasional dan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 10; c. Semua ketentuan tentang pendidikan tinggi dan RSBI dihapus; d. Kewajiban satuan pendidikan dalam penyediaan akses bagi peserta didik penyandang disabilitas.			
4.	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini,	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (5), Pasal 46 ayat (8), dan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini 2. Direktorat Sekolah Dasar	Tahun 2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
	Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah			3. Direktorat Sekolah Menengah Pertama 4. Direktorat Sekolah Menengah Atas 5. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	
5.	Masukan Revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan	Hal yang menjadi fokus penyusunan yaitu: 1. Penyesuaian kebijakan data terpadu di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini 2. Direktorat Sekolah Dasar 3. Direktorat Sekolah	Tahun 2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
		2. Penyusunan penyelenggaraan data sesuai dengan PP Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.		Menengah Pertama 4. Direktorat Sekolah Menengah Atas 5. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	
6.	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat mengenai standar	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini 2. Direktorat Sekolah Dasar 3. Direktorat Sekolah Menengah Pertama	Tahun 2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
		teknis pelayanan minimal sehingga perlu diganti.		4. Direktorat Sekolah Menengah Atas 5. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	

B. Kerangka Kelembagaan

Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen harus didukung oleh kerangka kelembagaan, yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang efektif dan efisien, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen secara optimal. Kerangka kelembagaan dimaksudkan agar penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen memiliki fungsi sebagai berikut:

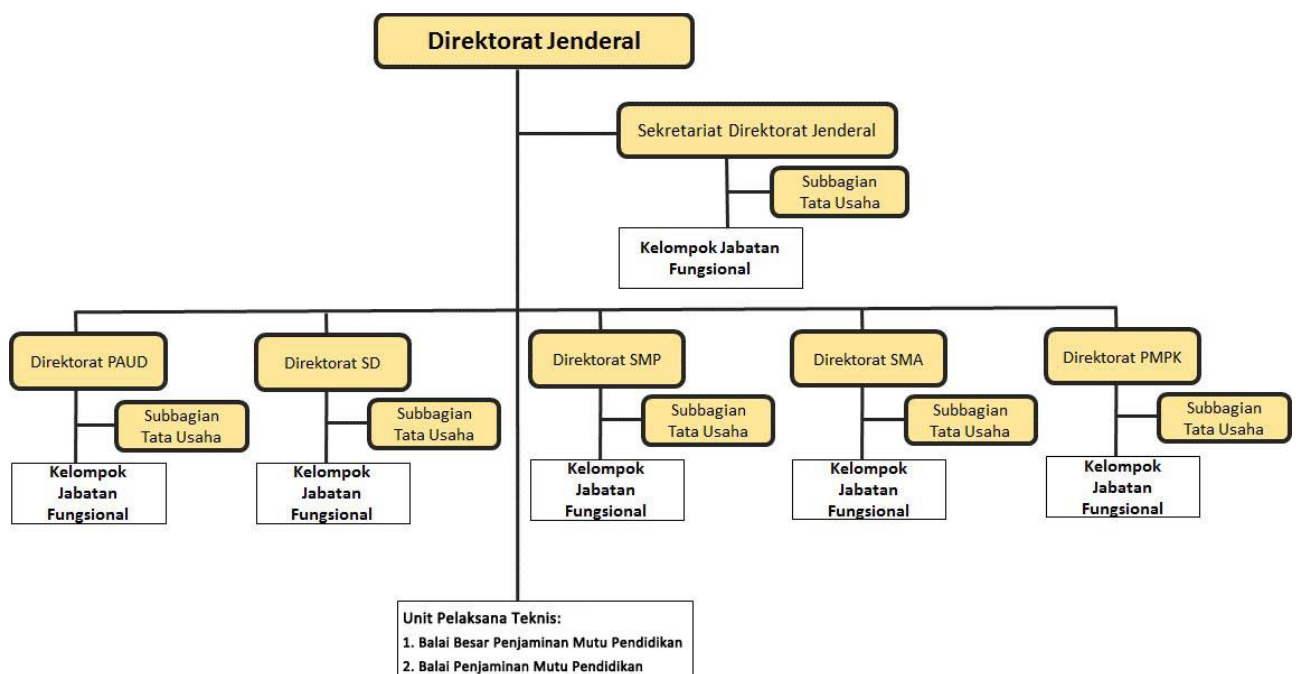
- a. Perumusan kebijakan peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- b. Perumusan standar peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- c. Pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- g. Perumusan pemberian izin penyelenggaraan satuan pendidikan yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing;

- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- i. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1. Struktur Organisasi

Mengacu pada tugas dan fungsi Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbudristek Nomor 28 tahun 2021 dan Permendikbudristek no. 11 tahun 2022, maka Struktur Organisasi Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen adalah seperti yang tergambar pada Gambar 15 berikut ini:

Gambar 17: Struktur Organisasi Ditjen Paud, Dikdas dan Dikmen



Seperti yang terlihat pada Gambar 15 di atas, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat jenderal, didukung oleh Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis di Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

- b. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Direktorat Sekolah Dasar (SD);
- d. Direktorat Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- e. Direktorat Sekolah Menengah Atas (SMA);
- f. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK);
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai perwakilan di daerah.

Setiap Unit kerja tersebut di atas memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda berdasarkan Permendikbud no. 28 tahun 2021 dan Permendikbud no. 11 tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut.

a. Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen

Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen menyelenggarakan fungsi:

- 1) Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- 2) Pengumpulan dan analisis data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- 3) Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- 4) Koordinasi pengelolaan dan pelaporan keuangan Direktorat Jenderal;
- 5) Penyusunan bahan peraturan perundang-undangan dan penelaahan dan fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
- 6) Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal;
- 7) Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal;
- 8) Penyiapan bahan pembinaan jabatan fungsional widyaprada;
- 9) Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- 10) Pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- 11) Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; dan
- 12) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Jenderal.

b. Direktorat PAUD

Direktorat PAUD mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat PAUD menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini;
- 2) Penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini;
- 3) Pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini;
- 4) Pelaksanaan kebijakan di bidang standar peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini;
- 5) Fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini;
- 6) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini;
- 7) Penyiapan perumusan pemberian izin penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau satuan pendidikan anak usia dini kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan Indonesia;
- 8) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini; dan
- 9) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

c. Direktorat SD

Direktorat SD mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat SD menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar;
- 2) Penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar;
- 3) Pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar;
- 4) Pelaksanaan kebijakan di bidang standar peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar;
- 5) Fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar;
- 6) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar;
- 7) Penyiapan perumusan pemberian izin penyelenggaraan sekolah dasar yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau sekolah dasar kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan Indonesia;
- 8) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sekolah dasar; dan
- 9) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

d. Direktorat SMP

Direktorat SMP mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sekolah menengah pertama dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertama.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat SMP menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah pertama dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertama;
- 2) Penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah pertama dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertama;
- 3) Pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah pertama dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertama;
- 4) pelaksanaan kebijakan di bidang standar peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah pertama dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertama;
- 5) Fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah pertama dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertama;
- 6) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah pertama dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertama;
- 7) Penyiapan perumusan pemberian izin penyelenggaraan sekolah menengah pertama yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan sekolah menengah pertama kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan Indonesia;
- 8) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sekolah menengah pertama; dan
- 9) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

e. Direktorat SMA

Direktorat SMA mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat SMA menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas;
- 2) Penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas;

- 3) Pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas;
- 4) Pelaksanaan kebijakan di bidang standar peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas;
- 5) Fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas;
- 6) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas;
- 7) Penyiapan perumusan pemberian izin penyelenggaraan sekolah menengah atas yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing dan sekolah menengah atas kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan Indonesia;
- 8) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sekolah menengah atas; dan
- 9) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

f. Direktorat PMPK

Direktorat PMPK mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus pada pendidikan khusus, pendidikan inklusi, dan unit layanan disabilitas pendidikan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat PMPK menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus pada pendidikan khusus, pendidikan inklusi, dan unit layanan disabilitas pendidikan;
- 2) Penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus pada pendidikan khusus, pendidikan inklusi, dan unit layanan disabilitas pendidikan;
- 3) Pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keaksaraan, pendidikan

kesetaraan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus pada pendidikan khusus, pendidikan inklusi, dan unit layanan disabilitas pendidikan;

- 4) Pelaksanaan kebijakan di bidang standar peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus pada pendidikan khusus, pendidikan inklusi, dan unit layanan disabilitas pendidikan;
- 5) Fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus pada pendidikan khusus, pendidikan inklusi, dan unit layanan disabilitas pendidikan;
- 6) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus pada pendidikan khusus, pendidikan inklusi, dan unit layanan disabilitas pendidikan;
- 7) Penyiapan perumusan pemberian izin penyelenggaraan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing;
- 8) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus; dan
- 9) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai perwakilan di daerah

Unit pelaksana teknis yang berada dibawah Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen adalah:

- 5 (lima) Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP)
- 29 (dua puluh sembilan) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP)

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, BBPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di provinsi. Dalam melaksanakan tugasnya, BBPMP menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- 2) Pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;

- 4) Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
- 5) Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- 6) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat; dan
- 7) Pelaksanaan urusan administrasi.

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, BPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPMP memiliki fungsi:

- 1) Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- 2) Pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
- 4) Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
- 5) Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- 6) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat; dan
- 7) Pelaksanaan urusan administrasi.

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Kebijakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas,

profesional, dan kompeten berdasarkan system merit sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal. Untuk itu, dalam 5 (lima) tahun kedepan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen diharapkan dapat mewujudkan birokrasi berkelas dunia (SMART ASN) sesuai dengan *Roadmap* SDM secara nasional yaitu ASN yang memiliki kompetensi integritas, nasionalisme, berwawasan global, TIK dan bahasa asing, *hospitality*, *networking*, dan *entrepreneurship*.

Untuk memastikan ketersediaan SDM tersebut, strategi utama yang dilakukan dalam pengelolaan SDM adalah melalui proses rekrutmen yang transparan untuk mendapatkan *talent* terbaik, peningkatan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi, serta penerapan system penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) dalam rangka meningkatkan kinerja seluruh ASN.

Jumlah SDM Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen adalah sebanyak 3.418 (tiga ribu empat ratus delapan belas) pegawai seperti yang dijelaskan pada Tabel 7.

Tabel 7: Jumlah ASN Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Tahun 2022

No	Unit Kerja	Jumlah
1.	Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen	162
2.	Direktorat PAUD	84
3.	Direktorat SD	114
4.	Direktorat SMP	135
5.	Direktorat SMA	110
6.	Direktorat PMPK	124
7.	BBPMP/BPMP	2.689
	Total	3.418

Sumber data kepegawaian bulan Maret 2022

3. Proyeksi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2020-2024

Kebutuhan ASN tahun 2020-2024 didasarkan pada kebutuhan organisasi sesuai hasil analisis beban kerja di masing-masing unit kerja dalam rangka pencapaian tujuan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Di samping itu, proyeksi kebutuhan SDM juga mempertimbangkan jumlah pegawai yang pensiun dari tahun ke tahun, dengan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi kerja di masing-masing unit kerja. Tabel 8 menggambarkan proyeksi kebutuhan SDM Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen sampai tahun 2024.

Tabel 8: Proyeksi Kebutuhan SDM Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Tahun 2020-2024

No	Unit Kerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	188	193	197	204	227

C. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi internal Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen ASN tidak transparan, belum ada perubahan paradigma (*mindset*), KKN yang masih terjadi di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima (mudah, murah, cepat, dan lebih baik) belum sepenuhnya terbangun secara luas.

Sebagai unit kerja yang mengemban amanat dalam membangun SDM melalui peningkatan mutu pendidikan dan pemajuan kebudayaan dengan memperhitungkan capaian kinerja, potensi, dan permasalahan, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen berupaya mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter. Untuk itu, Program Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 diharapkan dapat mencapai SDM yang berkualitas, baik dari aspek jumlah, kompetensi (*hard competencies* dan *soft competencies*), maupun integritas; termasuk pula manajemen serta kinerja SDM yang tinggi. Sumber Daya Manusia aparatur merupakan elemen terpenting bagi instansi pemerintah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan. Mengingat begitu pentingnya SDM aparatur, maka manajemen SDM diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana dan terpola agar tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu pula dalam reformasi birokrasi, aspek SDM aparatur menjadi aspek penting, sehingga perlu dilakukan penataan secara sistematis. Di samping aspek SDM aparatur, ketercapaian peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme sumber daya

aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen juga merupakan hal yang sangat penting.

Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen sebagai salah satu unit utama di lingkungan Kemdikbudristek, terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik, meliputi delapan area perubahan, yakni:

Tabel 9: 8 (Delapan) Area Perubahan

No.	Area Perubahan	Indikator	Program Kegiatan
1.	Manajemen Perubahan	Indeks Kepemimpinan Perubahan	a. Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (<i>reform</i>) b. Pembentukan tim kerja RBI di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen c. Penguatan nilai integritas, perubahan pola pikir dan budaya kinerja d. Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan <i>role model</i> dengan dibentuknya tim agen perubahan di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen e. Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0
2.	Penguatan Pengawasan	Maturitas SPIP	a. Pembentukan tim SPI dan SPIP di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen b. Penyusunan rencana kerja SPI dan SPIP c. Penguatan Sistem Manajemen Konflik
3.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	a. Perencanaan terintegrasi dan lintas sektor (<i>collaborative</i>) b. Implementasi manajemen kinerja berorientasi hasil
4.	Penguatan Kelembagaan	Indeks Kelembagaan	a. <i>Assessment</i> organisasi berbasis kinerja b. Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan berdasarkan hasil evaluasi

No.	Area Perubahan	Indikator	Program Kegiatan
5.	Penguatan Tata Laksana	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	a. Pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan b. Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital)
6.	Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	1. Indeks Profesionalitas ASN 2. Indeks Merit System 3. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi b. Pengembangan Pegawai berbasis Kompetensi c. Assessment Pegawai d. Penanaman nilai integritas melalui penghargaan pegawai dengan kinerja terbaik e. Analisis Kebutuhan Pelatihan Pegawai f. Pemetaan Kompetensi Pegawai sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)
7.	Penguatan Peraturan Perundang-Undangan	1. Indeks Reformasi Hukum 2. Indeks Kualitas Kebijakan	a. Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi (menghilangkan <i>overlapping</i> peraturan) b. Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi; c. Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan d. Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Inovasi 2. Indeks Pelayanan Publik	a. Penyusunan dokumen standar pelayanan b. Penyusunan alur layanan publik c. Mengembangkan budaya pelayanan prima d. Penguatan kompetensi petugas pelayanan publik

No.	Area Perubahan	Indikator	Program Kegiatan
			e. Penilaian terhadap pelayanan melalui survey dan analisis kepuasan pelanggan

Sumber: Draft Roadmap RBI Kemdikbudristek 2020-2024

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target Kinerja merupakan salah satu pentahapan yang sangat menentukan keberhasilan lembaga dalam mewujudkan tercapainya indikator kinerja sasaran dan misi Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen. Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen menetapkan 7 (tujuh) sasaran program (2 diantaranya tata kelola) untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Keberhasilan Sasaran Program tersebut ditentukan oleh ketercapaian Indikator Kinerja Program (IKP) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2020-2024 memuat 20 IKP yang akan dicapai melalui 12 (dua belas) program/kegiatan, yaitu:

1. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Pembinaan Sekolah Dasar (SD);
3. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
4. Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA);
5. Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK);
6. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Dasar (SD);
8. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP);
9. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Atas (SMA);
10. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK);
11. Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas;
12. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

A. TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan salah satu kunci keberhasilan program untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program.

Tabel 10: Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Baseline	Target		
			2020	2022	2023	2024
SP	Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah					
IKP 1.1.1	Persentase Kab/Kota dengan Angka Kesiapan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun di atas 75	%	63,42	63,81	64,20	64,59
IKP 1.2.1	Persentase Kab/kota dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun di atas 99%	%	76,85	77,82	78,40	76,85
IKP 1.3.1	Persentase Kab/Kota dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun di atas 95%	%	66,73	68,48	68,68	69,26
IKP 1.4.1	Persentase provinsi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMLB/MA/Sederajat di atas 95%	%	11,76	20,59	23,53	26,47
SP	Meningkatnya pencapaian perkembangan anak					
IKP 2.1.1	Persentase Kab/kota yang menyediakan layanan PAUD HI	%	9,73	29,19	38,92	48,64
SP	Meningkatnya nilai asesmen kompetensi (literasi dan numerasi) satuan pendidikan					
IKP 2.2.1	Jumlah satuan pendidikan yang menjadi sekolah penggerak	Sekolah	-	9.100	14.100	19.100
IKP 2.2.2	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran paradigma baru	%	-	2,14	3,32	4,49
SP	Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran					
IKP 2.2.7	Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan profil dan rapor pendidikan untuk mendukung perbaikan pembelajaran	%	-	25	50	75
SP	Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter					
IKP 2.3.1	Persentase satuan pendidikan yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	%	50	51	52	53
SP	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi					
IKP 5.3.6	Predikat SAKIP Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen	Predikat	A	A	A	A
SP	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek					
IKP 5.4.4	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	13	14	15	16

Untuk mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan 7 (tujuh) sasaran program pada tahun 2021-2024.

Tabel 11: Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
1. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun		
	1 Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah	1.1.1 Persentase Kab/Kota dengan Angka Kesiapan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun di atas 75
		1.2.1 Persentase Kab/kota dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun di atas 99%
		1.3.1 Persentase Kab/Kota dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun di atas 95%
		1.4.1 Persentase provinsi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMLB/MA/Sederajat di atas 95%
2. Program Kualitas Pengajaran & Pembelajaran		
	1 Meningkatnya pencapaian perkembangan anak	2.1.1 Persentase Kab/kota yang menyediakan layanan PAUD HI
	2 Meningkatnya nilai asesmen kompetensi (literasi dan numerasi) satuan pendidikan	2.2.1 Jumlah satuan pendidikan yang menjadi sekolah penggerak
		2.2.2 Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran paradigma baru
	3 Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran	2.2.7 Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan profil dan rapor pendidikan untuk mendukung perbaikan pembelajaran
4 Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter	2.3.1 Persentase satuan pendidikan yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	
3. Program Dukungan Manajemen		
	1 Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	5.3.6 Predikat SAKIP Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
	2 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemdikbudristek	5.4.5 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Untuk memenuhi Sasaran Program (SP) tersebut, Program-program prioritas yang dilakukan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen adalah:

1. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun
 - a. penyaluran Bantuan Dana Transfer Daerah untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
Merehabilitasi dan membangun prasarana Pendidikan (bekerjasama dengan PUPR), serta pengadaan sarana pendidikan.
 - b. Program Afirmasi
Pemberian bantuan pendidikan ke daerah-daerah yang memiliki keterbatasan.
2. Program Kualitas Pengajaran & Pembelajaran
 - a. Penyaluran Bantuan Dana Transfer Daerah untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Menyalurkan dan mengatur penggunaan dana BOS ke sekolah.
 - b. Program Sekolah Penggerak
Menghasilkan sekolah yang fokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan kehadiran sumber daya pendidik yang unggul.
3. Program Dukungan Manajemen
 - a. Reformasi Birokrasi Internal (RBI)
Melakukan upaya dalam birokrasi dengan menyederhanakan struktur dan memperkaya fungsi-fungsi yang terkait agar tata kelola menjadi fleksibel dan efisien.
 - b. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Melakukan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem pengawasan dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

B. KERANGKA PENDANAAN

Upaya untuk mencapai tujuan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dan sasaran-sasaran program yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemdikbudristek dibagi ke dalam dua periode yakni:

1. Pagu 2021 dan Pagu 2022; dan
2. Indikasi Kebutuhan Pendanaan 2023-2024

Tabel 12: Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Tahun 2021-2022

LABEL	KODE	PROGRAM/OUTPUT	PAGU 2021 (milyar Rp)	PAGU 2022 (milyar Rp)
Program	023.03.06	Program Pendidikan PAUD Dasar dan Menengah	4.061,64	2.208,88
Kegiatan	4272	Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini	173,24	29,71
Kegiatan	2003	Pembinaan Sekolah Dasar	569,22	34,38
Kegiatan	2000	Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	667,99	43,37
Kegiatan	5627	Pembinaan Sekolah Menengah Atas	211,69	41,55
Kegiatan	5626	Pendidikan Khusus dan Pendidikan Masyarakat	242,79	149,86
Kegiatan	4459	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	189,65	109,70
Kegiatan	4460	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Dasar	127,90	97,59
Kegiatan	4461	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama	182,17	86,78
Kegiatan	4462	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Atas	116,94	74,50
Kegiatan	4463	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Khusus dan Pendidikan Masyarakat	72,37	33,55
Kegiatan	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	276,50	347,76
Kegiatan	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	1.231,18	1.160,13

Adapun kebutuhan pendanaan pada tahun 2023-2024, tertuang pada tabel berikut:

Tabel 13: Kebutuhan Pendanaan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

No	Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan		Jumlah
		(Miliar Rp)		
		2023	2024	
1	Program Dukungan Manajemen	1.464.472,53	1.903.814,28	3.368.286,81
2	Program Kualitas Pembelajaran	3.874.134,03	4.220.736,72	8.094.870,75
3	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	982.091,66	1.045.529,61	1.973.621,27
Jumlah		6.320.698,22	7.170.080,61	13.436.778,83

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2020-2024 ini merupakan penyesuaian renstra Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen 2020-2024 sebelumnya, disusun dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter yang menjadi mandat Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen.

Renstra ini disusun untuk membawa perubahan dalam rangka: (1) penekanan fokus pada mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik; (2) pengembangan karakter peserta didik; (3) penekanan pada perluasan akses pendidikan bermutu, terutama melalui afirmasi yang berkeadilan dan inklusif; dan (4) penguatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pendidikan sekaligus penguatan peran Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang memiliki mandat menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria untuk diikuti oleh pemerintah daerah selaku pelaksana layanan pendidikan dasar dan menengah.

Renstra ini menjabarkan visi Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen beserta sasaran program, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran program yang ditargetkan. Dengan demikian Renstra ini menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran program, dan sasaran kegiatan, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen ini diharapkan untuk digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang hendak dicapai pada periode 2020 – 2024 baik bagi Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal. Selain itu Renstra Direktorat Jenderal ini merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal, ataupun sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Selain yang diuraikan di atas, Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja di bawah Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, serta seluruh masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan bidang Pendidikan Anak Usia Dini,

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, selama lima tahun mendatang yang hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat seluruh Indonesia.

LAMPIRAN

Lampiran 1a. Matriks dan Pendanaan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Tahun 2020

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2020	2020	
SS 1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang				
IKSS 1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	%	40,20		
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	%	105,97		
IKSS 1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	%	92,46		
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	%	86,18		
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang				
IKSS 2.1	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	nilai	3		
IKSS 2.2	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	57,20		
IKSS 2.3	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	26,50		
IKSS 2.4	Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca	nilai	-		
IKSS 2.5	Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika	nilai	-		
IKSS 2.6	Nilai rata-rata hasil PISA: Sains	nilai	-		
SS 3	Menguatnya karakter peserta didik				
IKSS 3.1	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	30		
IKSS 3.2	Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila	%	10		
IKSS 3.3	Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar	%	10		
023.03.06	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah			6.050,60	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak

					Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
SP 3.1	Meningkatnya perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan Wajib Belajar 12 Tahun				
IKP 3.1.1	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/RA/BA (5-6 tahun)	%	66,49		
IKP 3.1.2	Jumlah kab/kota dengan nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimum 75 (kategori tinggi)	kab/kota	6		
IKP 3.1.3	Jumlah provinsi dengan nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimum 75 (kategori tinggi)	provinsi	6		
SP 3.2	Meningkatnya mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah				
IKP 3.2.1	Persentase satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai <i>scorecard</i> minimum 75 (kategori tinggi)	%	-		
IKP 3.2.2	Jumlah satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak	satuan pendidikan	-		
SP 3.3	Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah				
IKP 3.3.1	Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan	%	58,68		
IKP 3.3.2	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	57,20		
IKP 3.3.3	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	26,50		
SP 3.4	Meningkatnya karakter peserta didik				
IKP 3.4.1	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	30		
IKP 3.4.2	Persentase siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi tingkat minimum	%	57,20		
SP 3.5	Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah				

IKP 3.5.1	Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkan tepat waktu	%	50		
IKP 3.5.2	Persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS Non-Tunai	%	1,80		
IKP 3.5.3	Persentase prov/kab/kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar pengambilan keputusan	%	55		
IKP 3.5.4	Persentase data pokok PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	95		
SP 3.6	Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkualitas				
IKP 3.6.1	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah minimal BB	predikat	BB		
IKP 3.6.2	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	11		
4272	Penyediaan Layanan PAUD			358,60	Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
SK	Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas				
IKK	Jumlah peserta didik usia 3-6 tahun yang mengikuti menerima BOP PAUD	juta orang	7,48		
IKK	Jumlah kab/kota dengan persentase siswa kelas 1 yang melalui TK/RA/BA di atas 50%	kab/kota	103		
IKK	Jumlah kab/kota dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 53,10%	kab/kota	115		
IKK	Jumlah PAUD yang menjadi Sekolah Penggerak	satuan pendidikan	-		
IKK	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	nilai	3		
IKK	Persentase satuan PAUD yang memiliki nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi)	%	-		
IKK	Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan	%	20		
IKK	Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif	%	25		
IKK	Persentase data pokok pendidikan PAUD yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	80		
2003	Pembinaan Sekolah Dasar			1.122,75	Direktorat Sekolah Dasar
SK	Tersedianya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas				

IKK	Jumlah kab/kota dengan APK SD/MI/SDLB sekurang-kurangnya 100%	kab/kota	391		
IKK	Jumlah SD yang menjadi Sekolah Penggerak	sekolah	-		
IKK	Persentase SD yang memiliki nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi)	%	-		
IKK	Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	53		
IKK	Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	26,50		
IKK	Persentase SD yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	%	62,50		
IKK	Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	30		
IKK	Persentase data pokok pendidikan SD yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	95,10		
2000	Pembinaan Sekolah Menengah Pertama			944,48	Direktorat Sekolah Menengah Pertama
SK	Tersedianya layanan pendidikan SMP yang merata dan berkualitas				
IKK	Jumlah kab/kota dengan APK SMP/MTs/SMPLB sekurang-kurangnya 100%	kab/kota	317		
IKK	Jumlah SMP yang menjadi Sekolah Penggerak	sekolah	-		
IKK	Persentase SMP yang memiliki nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi)	%	-		
IKK	Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	53		
IKK	Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	26,50		
IKK	Persentase SMP yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	%	62,50		
IKK	Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	30		
IKK	Persentase data pokok pendidikan SMP yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	95,20		

5627	Pembinaan Sekolah Menengah Atas			514,67	Direktorat Sekolah Menengah Atas
SK	Tersedianya layanan pendidikan SMA yang merata dan berkualitas				
IKK	Jumlah kab/kota dengan APK SMA/MA/SMLB sekurang-kurangnya 95%	kab/kota	219		
IKK	Jumlah SMA yang menjadi Sekolah Penggerak	sekolah	-		
IKK	Persentase SMA yang memiliki nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi)	%	-		
IKK	Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	53		
IKK	Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	26,50		
IKK	Persentase SMA yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	%	73,84		
IKK	Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	30		
IKK	Persentase data pokok pendidikan SMA yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	95,10		
5626	Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus			698,16	Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
SK	Tersedianya layanan Pendidikan masyarakat dan Pendidikan Khusus yang merata dan berkualitas				
IKK	Jumlah SLB/SKB yang menjadi Sekolah Penggerak	sekolah	-		
IKK	Persentase SLB yang memiliki nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi)	%	-		
IKK	Persentase SLB yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	%	9,65		
IKK	Persentase SLB yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	30		
IKK	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	pemda	514		
IKK	Jumlah Orang Dewasa Yang Mendapat Layanan Pendidikan Keaksaraan	orang	94.500		

IKK	Persentase data pokok pendidikan SLB yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	98,93		
2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah			350,26	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
SK	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen				
IKK	Persentase satuan pendidikan penerima dana BOS dari total satuan pendidikan yang bersedia/tidak menolak BOS	%	99		
IKK	Jumlah provinsi/kab/kota yang difasilitasi untuk menggunakan NPD sebagai dasar pengambilan keputusan penganggaran	prov/kab/kota	300		
IKK	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB		
IKK	Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	satker	69		
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL masing-masing Satker minimal 80	nilai	81		
IKK	Persentase data pokok pendidikan dasar dan menengah yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	95,20		
4273	Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUD			490,07	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
SK	Meningkatnya penjaminan mutu PAUD dan Dikmas				
IKK	Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah dipetakan mutu pendidikannya	%	35		
IKK	Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah disupervisi mutu pendidikannya	%	35		
IKK	Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah difasilitasi mutu pendidikannya berdasarkan SNP	%	35		

IKK	Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan anak usia dini akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	80		
5630	Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan			1.571,61	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
SK	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan				
IKK	Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (<i>score card</i>) minimal 75	%	26,50		
IKK	Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	%	5		
IKK	Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	95		

Lampiran 1b. Matriks dan Pendanaan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Tahun 2021

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2021	2021	
SS 1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang				
IKSS 1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	%	42,62		
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	%	104,48		
IKSS 1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	%	94,34		
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	%	88,39		
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang				
IKSS 2.1	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	nilai	3,25		
IKSS 2.2	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	58,20		
IKSS 2.3	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	27,40		
IKSS 2.4	Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca	nilai	394		
IKSS 2.5	Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika	nilai	385		
IKSS 2.6	Nilai rata-rata hasil PISA: Sains	nilai	399		
SS 3	Menguatnya karakter peserta didik				
IKSS 3.1	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	35		
IKSS 3.2	Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila	%	15		
IKSS 3.3	Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar	%	15		
2	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran			4.664,24	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; Direktorat

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2021	2021	
					Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah; Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
SP 2.3	Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah				Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
IKP 2.3.1	Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan	%	64,68		
IKP 2.3.2	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	58,20		
IKP 2.3.3	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	27,40		
3	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun			23.265,62	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2021	2021	
					Sekretariat Jenderal
SP 3.1	Meningkatnya perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan Wajib Belajar 12 Tahun				
IKP 3.1.1	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/ sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya	rasio	0,71		
IKP 3.1.2	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/RA/BA (5-6 tahun)	%	68,06		
IKP 3.1.3	Jumlah kab/kota dengan nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimum 75 (kategori tinggi)	kab/kota	56		
IKP 3.1.4	Jumlah provinsi dengan nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimum 75 (kategori tinggi)	provinsi	10		
SP 3.2	Meningkatnya mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah				
IKP 3.2.1	Persentase satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai <i>scorecard</i> minimum 75 (kategori tinggi)	%	5		
IKP 3.2.2	Jumlah satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak	satuan pendidikan	4.503		
SP 3.3	Meningkatnya karakter peserta didik				
IKP 3.3.1	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	35		
IKP 3.3.2	Persentase siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi tingkat minimum	%	58,20		
SP 3.4	Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah				
IKP 3.4.1	Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkan tepat waktu	%	60		
IKP 3.4.2	Persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS Non-Tunai	%	15,86		
IKP 3.4.3	Persentase prov/kab/kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar pengambilan keputusan	%	60		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2021	2021	
IKP 3.4.4	Persentase data pokok PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	95		
	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah			6.232,10	
4272	Penyediaan Layanan PAUD				Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
SK	Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas				
IKK	Jumlah peserta didik usia 3-6 tahun yang mengikuti menerima BOP PAUD	juta orang	8,65		
IKK	Jumlah kab/kota dengan persentase siswa kelas 1 yang melalui TK/RA/BA di atas 50%	kab/kota	154		
IKK	Jumlah kab/kota dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 53,10%	kab/kota	135		
IKK	Jumlah PAUD yang menjadi Sekolah Penggerak	satuan pendidikan	626		
IKK	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	nilai	3,25		
IKK	Persentase satuan PAUD yang memiliki nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi)	%	5		
IKK	Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan	%	40		
IKK	Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif	%	35		
IKK	Persentase data pokok PAUD yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	90		
2003	Pembinaan Sekolah Dasar				Direktorat Sekolah Dasar
SK	Tersedianya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas				
IKK	Jumlah kab/kota dengan APK SD/MI/SDLB sekurang-kurangnya 100%	kab/kota	401		
IKK	Jumlah SD yang menjadi Sekolah Penggerak	sekolah	1.172		
IKK	Persentase SD yang memiliki nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi)	%	5		
IKK	Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	55		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2021	2021	
IKK	Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	27,40		
IKK	Persentase SD yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	%	65		
IKK	Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	35		
IKK	Persentase data pokok pendidikan SD yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	95,20		
2000	Pembinaan Sekolah Menengah Pertama				Direktorat Sekolah Menengah Pertama
SK	Tersedianya layanan pendidikan SMP yang merata dan berkualitas				
IKK	Jumlah kab/kota dengan APK SMP/MTs/SMPLB sekurang-kurangnya 100%	kab/kota	327		
IKK	Jumlah SMP yang menjadi Sekolah Penggerak	sekolah	1.603		
IKK	Persentase SMP yang memiliki nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi)	%	5		
IKK	Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	55		
IKK	Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	27,40		
IKK	Persentase SMP yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	%	65		
IKK	Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	35		
IKK	Persentase data pokok pendidikan SMP yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	95,90		
5627	Pembinaan Sekolah Menengah Atas				Direktorat Sekolah Menengah Atas

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2021	2021	
SK	Tersedianya layanan pendidikan SMA yang merata dan berkualitas				
IKK	Jumlah kab/kota dengan APK SMA/MA/SMLB sekurang-kurangnya 95%	kab/kota	229		
IKK	Jumlah SMA yang menjadi Sekolah Penggerak	sekolah	650		
IKK	Persentase SMA yang memiliki nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi)	%	5		
IKK	Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	55		
IKK	Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	27,40		
IKK	Persentase SMA yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	%	76,06		
IKK	Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	35		
IKK	Persentase data pokok pendidikan SMA yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	95		
5626	Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus				Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
SK	Tersedianya layanan Pendidikan masyarakat dan Pendidikan Khusus yang merata dan berkualitas				
IKK	Jumlah SLB/SKB yang menjadi Sekolah Penggerak	sekolah	452		
IKK	Persentase SLB yang memiliki nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi)	%	5		
IKK	Persentase SLB yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	%	14,08		
IKK	Persentase SLB yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	35		
IKK	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan pembinaan pendidikan kesetaraan	pemda	514		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2021	2021	
IKK	Jumlah orang dewasa yang mendapat layanan pendidikan keaksaraan	orang	94.500		
IKK	Persentase data pokok pendidikan SLB yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	99,19		
2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah				Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
SK	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen				
IKK	Persentase satuan pendidikan penerima dana BOS dari total satuan pendidikan yang bersedia/tidak menolak BOS	%	99		
IKK	Jumlah provinsi/kab/kota yang difasilitasi untuk menggunakan NPD sebagai dasar pengambilan keputusan penganggaran	prov/kab /kota	330		
IKK	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB		
IKK	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	14		
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL masing-masing Satker minimal 80	nilai	82		
IKK	Persentase data pokok pendidikan dasar dan menengah yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	95,40		

Lampiran 1c. Matriks dan Pendanaan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Tahun 2022-2024

Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
SS 1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang									
IKSS 1.1	Angka Kesiapan Sekolah	%	74,96	75,38	75,59	75,79				
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	%	99,26	99,30	99,32	99,34				
IKSS 1.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	%	95,74	96,14	96,34	96,55				
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/ Sederajat	%	84,53	88,39	92,80	95,00				
IKSS 1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	%	30,85	31,52	36,64	37,63				
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang									
IKSS 2.1	Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD	Nilai	0,49	0,51	0,52	0,53				
IKSS 2.2	Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum									
	a. Literasi	%	43,00	47,50	49,75	52,00				
	b. Numerasi	%	22,90	28,30	29,20	30,10				
IKSS 2.3	Persentase satuan Pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik	%	-	27,50	30	32,50				

Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel									
IKSS 5.3	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	Predikat	BB	BB	A	A				
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	Indeks	78	83	85	87				
	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun									
SP	Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah									
IKP 1.1.1	Persentase Kab/Kota dengan Angka Kesiapan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun diatas 75	%	63,42	63,81	64,20	64,59	6.268,85	6.582,29	6.911,40	Ditjen Paudnasmen
IKP 1.2.1	Persentase Kab/kota dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun diatas 99%	%	76,85	77,82	78,40	76,85	34.375,77	36.094,56	37.899,29	Ditjen Paudnasmen
IKP 1.3.1	Persentase Kab/Kota dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun diatas 95%	%	66,73	68,48	68,68	69,26	43.373,69	45.542,38	47.819,50	Ditjen Paudnasmen
IKP 1.4.1	Persentase provinsi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMLB/MA/Sederajat diatas 95%	%	11,76	20,59	23,53	26,47	41.552,46	43.630,08	45.811,58	Ditjen Paudnasmen
	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran									
SP	Meningkatnya pencapaian perkembangan anak									
IKP 2.1.1	Persentase Kab/kota yang menyediakan layanan PAUDHI	%	9,73	29,19	38,92	48,64	21.880,83	28.445,07	36.978,59	Ditjen Paudnasmen

Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
SP	Meningkatnya nilai asesmen kompetensi (literasi dan numerasi) satuan pendidikan									
IKP 2.2.1	Jumlah satuan pendidikan yang menjadi sekolah penggerak	Sekolah	-	9.100	14.100	19.100	100.464,13	130.603,37	169.784,38	Ditjen Pauddasmen
IKP 2.2.2	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran paradigma baru	%	-	2,14	3,32	4,49	91.678,44	119.181,97	154.936,57	Ditjen Pauddasmen
SP	Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran									
IKP 2.2.7	Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan profil dan rapor pendidikan untuk mendukung perbaikan pembelajaran	%	-	25	50	75	3.344.961,43	3.428.924,87	3.651.964,81	Ditjen Pauddasmen
SP	Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter									
IKP 2.3.1	Persentase satuan pendidikan yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	%	50	51	52	53	17.044,51	22.157,87	28.805,23	Ditjen Pauddasmen
	Program Dukungan Manajemen									
SP	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi									
IKP 5.3.6	Predikat SAKIP Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen	Predikat	A	A	A	A	110.287,35	143.373,56	186.385,62	Ditjen Pauddasmen
SP	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek									
IKP 5.4.5	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	13	14	15	16	1.016.229,98	1.321.098,97	1.717.428,66	Ditjen Pauddasmen

Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
4272	Pembinaan PAUD									
SK	Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas									
IKK 1.1.1.1	Jumlah satuan PAUD menerima program afirmasi	Lembaga	-	105	108	110	6.268,85	6.582,29	6.911,40	Dit. PAUD
4459	Peningkatan Kualitas Pembelajaran PAUD									
SK	Meningkatnya capaian perkembangan PAUD yang berkualitas									
IKK 2.1.1.1	Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integratif	%	25,78	30,66	33,12	35,56	21.880,83	28.445,07	36.978,59	Dit. PAUD
SK	Meningkatnya pembelajaran PAUD yang berkualitas			-	-	-				
IKK 2.2.1.1	Jumlah PAUD Penggerak	Lembaga	-	2.000	3.150	4.300	23.751,50	30.876,95	40.140,04	Dit. PAUD
IKK 2.2.2.1	Persentase satuan PAUD yang menerapkan pembelajaran paradigma baru	%	-	0,98	1,54	2,11	27.431,68	35.661,18	46.359,53	Dit. PAUD
IKK 2.2.7.1	Persentase satuan PAUD yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran	%	-	0,98	1,54	2,11	36.636,00	47.626,80	61.914,83	Dit. PAUD
IKK 2.2.7.2	Persentase satuan PAUD yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas	%	9,54	10,21	10,88	12,23	128.625,00	171.500,00	343.000,00	Dit. PAUD
2003	Pembinaan Sekolah Dasar									
SK	Tersedianya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas									

Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
IKK 1.2.1.1	Jumlah SD menerima program afirmasi	Lembaga	-	320	330	340	34.375,77	36.094,56	37.899,29	Dit. SD
4460	Peningkatan Kualitas Pembelajaran SD									
SK	Meningkatnya pembelajaran Sekolah dasar yang berkualitas			-	-	-				
IKK 2.2.1.2	Jumlah SD Penggerak	Lembaga	-	4.156	6.479	8.802	35.083,90	45.609,07	59.291,79	Dit. SD
IKK 2.2.2.2	Persentase SD yang menerapkan pembelajaran paradigma baru	%	-	2,78	4,34	5,9	22.019,54	28.625,40	37.213,02	Dit. SD
IKK 2.2.7.3	Persentase SD yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran	%	-	2,78	4,34	5,90	30.788,72	40.025,34	52.032,94	Dit. SD
IKK 2.2.7.4	Persentase SD yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas	%	25,83	44,33	59,49	74,66	2.828.250,00	2.828.250,00	2.828.250,00	Dit. SD
SK	Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter Peserta didik Sekolah Dasar									
IKK 2.3.1.1	Persentase SD yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	%	50	51	52	53	3.231,41	4.200,84	5.461,09	Dit. SD
2000	Pembinaan Sekolah Menengah Pertama									
SK	Tersedianya layanan pendidikan SMP yang merata dan berkualitas									
IKK 1.3.1.1	Jumlah SMP menerima program afirmasi	Lembaga	-	490	500	510	43.373,69	45.542,38	47.819,50	Dit. SMP
4461	Peningkatan Kualitas Pembelajaran SMP									
SK	Meningkatnya pembelajaran Sekolah Menengah Pertama yang berkualitas			-	-	-				

Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
IKK 2.2.1.3	Jumlah SMP Penggerak	Lembaga	-	1.779	2.750	3.721	15.163,62	19.712,70	25.626,51	Dit. SMP
IKK 2.2.2.3	Persentase SMP yang menerapkan pembelajaran paradigma baru	%	-	4,31	6,67	9,02	21.792,00	28.329,60	36.828,48	Dit. SMP
IKK 2.2.7.5	Persentase SMP yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran	%	-	4,31	6,67	9,02	32.646,83	42.440,88	55.173,14	Dit. SMP
IKK 2.2.7.6	Persentase SMP yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas	%	68,37	87,37	90,78	94,18	175.625,00	175.625,00	175.625,00	Dit. SMP
SK	Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter Peserta didik Sekolah Menengah Pertama									
IKK 2.3.1.2	Persentase SMP yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	%	44	45	46	47	5.726,77	7.444,80	9.678,25	Dit. SMP
5627	Pembinaan Sekolah Menengah Atas									
SK	Tersedianya layanan pendidikan SMA yang merata dan berkualitas									
IKK 1.4.1.1	Jumlah SMA menerima program afirmasi	Lembaga	-	185	208	220	41.552,46	43.630,08	45.811,58	Dit. SMA
4462	Peningkatan Kualitas Pembelajaran SMA									
SK	Meningkatnya pembelajaran Sekolah Menengah Atas yang berkualitas			-	-	-				
IKK 2.2.1.4	Jumlah SMA Penggerak	Lembaga	-	980	1.458	1.936	18.925,11	24.602,64	21.983,44	Dit. SMA
IKK 2.2.2.4	Persentase SMA yang menerapkan pembelajaran paradigma baru	%	-	7,01	10,43	13,85	10.435,23	13.565,80	17.635,53	Dit. SMA
IKK 2.2.7.7	Persentase SMA yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran	%	-	7,01	10,43	13,85	26.663,88	34.663,05	45.061,96	Dit. SMA

Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
IKK 2.2.7.8	Persentase SMA yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas	%	79,43	91,88	95,78	99,68	68.125,00	68.125,00	68.125,00	Dit. SMA
SK	Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter Peserta didik Sekolah Menengah Atas									
IKK 2.3.1.3	Persentase SMA yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	%	65	66	67	68	6.159,66	8.007,56	10.409,83	Dit. SMA
5626	Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus									
SK	Tersedianya layanan Pendidikan masyarakat dan Pendidikan Khusus yang merata dan berkualitas									
IKK 1.4.1.2	Persentase Prov/Kab/Kota yang menyediakan pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus	%	-	90,08	92,02	94,36	806.361,27	850.242,35	907.087,84	Dit. PMPK
4463	Peningkatan Kualitas Pembelajaran PMPK									
SK	Meningkatnya pembelajaran Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus yang berkualitas									
IKK 2.2.1.5	Jumlah SLB Penggerak	Lembaga	-	185	263	341	7.540,00	9.802,00	12.742,60	Dit. PMPK
IKK 2.2.2.5	Persentase Lembaga Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus yang menerapkan pembelajaran paradigma baru	%	-	8,23	11,7	15,18	10.000,00	13.000,00	16.900,00	Dit. PMPK
IKK 2.2.7.9	Persentase Lembaga Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran	%	-	8,23	11,70	15,18	10.226,00	13.293,80	17.281,94	Dit. PMPK

Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
IKK 2.2.7.10	Persentase SLB yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas	%	11,88	13,90	13,90	13,90	7.375,00	7.375,00	5.500,00	Dit. PMPK
SK	Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter Peserta didik Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Khusus									
IKK 2.3.1.4	Persentase lembaga pendidikan kesetaraan dan SLB yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	%	45	46	47	48	1.926,67	2.504,67	3.256,07	Dit. PMPK
6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas									
SK	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen									
IKK 2.2.7.11	Persentase satuan pendidikan (paud dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	%	-	0,98	1,96	3,92	51.015,26	66.319,84	86.215,80	UPT Ditjen Pauddasmen
IKK 2.2.7.12	Persentase Prov/Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	%	-	25,00	30,00	35,00	60.385,42	78.501,04	102.051,35	UPT Ditjen Pauddasmen
2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah									
SK	Menguatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen									
IKK 5.3.6.1	Persentase Satker di Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang memiliki predikat SAKIP minimal A	%	39	44	47	50	110.287,35	143.373,56	186.385,62	Setditjen Pauddasmen

Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
IKK 5.4.5.1	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	25	17	22	27	1.016.229,98	1.321.098,97	1.717.428,66	Setditjen Paudnasmen

Lampiran 2. Definisi Operasional, Metode Penghitungan, dan Sumber Data

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
SS 1	Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan di Seluruh Jenjang					
IKSS 1.1	Angka Kesiapan Sekolah	Angka Kesiapan Sekolah (AKS) digunakan untuk mengukur kesiapan anak dalam memasuki jenjang pendidikan dasar (SD/Sederajat). Indikator ini menggambarkan seberapa banyak siswa kelas 1 SD yang pada tahun ajaran sebelumnya telah mengikuti PAUD	$(\sum \text{siswa kelas 1 SD/Sederajat yang pernah mengikuti PAUD} / \sum \text{siswa kelas 1 SD/Sederajat}) \times 100\%$	Meningkatnya Angka Kesiapan Sekolah (AKS) siswa kelas 1 SD mendekati angka 100%	Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Badan Pusat Statistik (BPS)
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	Indikator ini menghitung proporsi dari penduduk kelompok usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia 7-12 tahun	$(\sum \text{penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah} / \sum \text{penduduk usia 7-12 th}) \times 100\%$	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun mendekati angka 100%	Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Badan Pusat Statistik (BPS)
IKSS 1.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	Indikator ini menghitung proporsi dari penduduk kelompok usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia 13-15 tahun	$(\sum \text{penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah} / \sum \text{penduduk usia 13-15 th}) \times 100\%$	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 13-15 tahun mendekati angka 100%	Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Badan Pusat Statistik (BPS)

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB /Sederajat	persentase perbandingan jumlah penduduk yang bersekolah pada SMA/SMK/SMLB/MA/Sederajat, negeri maupun swasta) terhadap jumlah penduduk usia 16-18 tahun	$(\sum \text{peserta didik SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat} / \sum \text{penduduk usia 16-18 th}) \times 100\%$	Meningkatnya APK SMA/SMK/SMLB/MA/ sederajat mendekati angka 100%	Direktorat Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Badan Pusat Statistik (BPS)
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang					
IKSS 2.1	Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD	Nilai Kualitas lingkungan belajar adalah perhitungan dari sejumlah indikator yang tergabung dalam dua kategori, yaitu i) kualitas proses pembelajaran, dan ii) kualitas pengelolaan satuan berdasarkan kerangka profil pendidikan anak usia dini	Skor masing-masing dimensi merupakan komposit dari skor-skor indikator level 1, yang berasal dari sekumpulan skor indikator level 2, yang diperoleh dari sekumpulan butir atau item data yang digunakan	Meningkatnya nilai kualitas lingkungan belajar PAUD dengan indikator terkait mendekati nilai 1	Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	BAN PAUD
IKSS 2.2	Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum, Literasi dan numerasi	Pada AN, AKM mengukur dua macam literasi, yaitu Literasi Membaca (Baca: Literasi) dan Literasi Matematika (Baca: Numerasi). Keduanya dipilih karena merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan diperlukan oleh semua peserta didik. Literasi dan numerasi juga merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran	$\% = (\sum \text{responden siswa yg mencapai nilai minimum AKM}) / (\sum \text{siswa yang mengikuti AKM}) \times 100\%$	Meningkatnya persentase jumlah siswa yang mencapai nilai minimal literasi dan numerasi mendekati 100%	Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Inventori Data Hasil Asesmen Nasional

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
IKSS 2.3	Persentase satuan Pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik	Pada AN, survei karakter akan diberikan kepada peserta didik, sedangkan survei lingkungan belajar akan diberikan kepada peserta didik, guru, dan kepala satuan pendidikan	$(\Sigma \text{ satuan pendidikan pada semua jenjang dengan indeks karakter, indeks iklim keamanan, serta indeks iklim inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik} / \Sigma \text{ satuan pendidikan semua jenjang}) \times 100\%$	Meningkatnya persentase jumlah satuan pendidikan yang indeks karakter, iklim keamanan, inklusivitas, dan kebhinekaan pada kategori baik mendekati 100%	Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Inventori Data Hasil Asesmen Nasional
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel					
IKSS 5.3	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	[Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja]	Meningkatnya predikat SAKIP Kemdikbudristek menuju predikat A	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Surat Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenPAN-RB
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	penyimpulan atas hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi	$\text{Nilai PMRPB} = (60\% \times \text{Komponen Pengungkit}) + (40\% \times \text{komponen hasil})$	Meningkatnya indeks reformasi Kemdikbudristek mendekati angka 100	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Surat Menteri PANRB tentang hasil PMPRB

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
SP	Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah					
IKP 1.1.1	Persentase Kab/Kota dengan Angka Kesiapan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun diatas 75	Angka Kesiapan Sekolah (AKS) digunakan untuk mengukur kesiapan anak dalam memasuki jenjang pendidikan dasar (SD/Sederajat). Indikator ini menggambarkan seberapa banyak siswa kelas 1 SD yang pada tahun ajaran sebelumnya telah mengikuti PAUD	$(\Sigma \text{ kab/kota dengan proporsi anak pada kelas 1 SD/Sederajat yang pernah mengikuti PAUD pada satu tahun sebelumnya dengan persentase di atas 75}) / \Sigma \text{ kab/kota} \times 100$	Meningkatnya persentase kab/kota dengan siswa kelas 1 Sekolah Dasar yang pernah mengikuti PAUD di atas persentase 75 mendekati 100%	Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.	Badan Pusat Statistik (BPS)
IKP 1.2.1	Persentase Kab/kota dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun diatas 99%	Jumlah kabupaten/kota dengan proporsi dari perbandingan penduduk kelompok usia sekolah 7-12 tahun yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian (nilai APS) di atas 99% terhadap jumlah seluruh kabupaten/kota	$(\Sigma \text{ kab/kota dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun di atas 99\%}) / (\Sigma \text{ kab/kota}) \times 100 \%$	Meningkatnya persentase kab/kota dengan penduduk usia sekolah 7-12 tahun yang bersekolah di atas persentase 99 mendekati 100%	Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.	Badan Pusat Statistik (BPS)
IKP 1.3.1	Persentase Kab/Kota dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun diatas 95%	Jumlah kabupaten/kota dengan proporsi dari perbandingan penduduk kelompok usia sekolah 13-15 tahun yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian (nilai APS) diatas 95% terhadap jumlah seluruh kabupaten/kota	$(\Sigma \text{ kab/kota dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun di atas 95\%}) / (\Sigma \text{ kab/kota}) \times 100 \%$	Meningkatnya persentase kab/kota dengan penduduk usia sekolah 13-15 tahun yang bersekolah di atas persentase 95 mendekati 100%	Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Badan Pusat Statistik (BPS)

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
IKP 1.4.1	Persentase provinsi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMLB/MA/Sederajat diatas 95%	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMLB/MA/ sederajat merupakan persentase perbandingan jumlah penduduk yang bersekolah pada SMA/SMK/SMLB/MA/ sederajat, negeri maupun swasta) terhadap jumlah penduduk usia 16-18 tahun.	$(\Sigma \text{ Provinsi Yang memiliki APK SMA/SMK/SMLB/ Sederajat diatas 95\%}) / (\Sigma \text{ Total Provinsi di Indonesia}) \times 100 \%$	Meningkatnya persentase provinsi dengan penduduk usia sekolah 16-18 tahun bersekolah di SMA/ sederajat di atas persentase 95 mendekati 100%	Direktorat Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Badan Pusat Statistik (BPS)
SP	Meningkatnya pencapaian perkembangan anak					
IKP 2.1.1	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan PAUDHI	PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) adalah penanganan anak usia dini secara utuh (menyeluruh) yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, dan perlindungan, untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, pemerintah daerah, dan pusat.	$(\Sigma \text{ Kab/kota yang mendapatkan pendampingan dalam penyediaan layanan PAUDHI}) / \Sigma \text{ total kab/kota di Indonesia} \times 100 \%$	Meningkatnya persentase kab/kota yang menyelenggarakan layanan PAUD Holistik Integratif mendekati 100%	Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.	Dapodik
SP	Meningkatnya nilai asesmen kompetensi (literasi dan numerasi) satuan pendidikan					

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
IKP 2.2.1	Jumlah satuan pendidikan yang menjadi sekolah penggerak	Sekolah Penggerak merupakan katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Visi Pendidikan Indonesia yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis; kreatif; mandiri; beriman bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia; bergotong royong dan berkebinekaan global.	Σ satuan pendidikan yang ditetapkan menjadi sekolah penggerak sesuai SK yang telah diterbitkan	Meningkatnya jumlah satuan pendidikan penggerak mendekati jumlah seluruh satuan pendidikan	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Database Sekolah Penggerak
IKP 2.2.2	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran paradigma baru	Jumlah satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila. Kurikulum paradigma baru tersebut akan mulai digunakan di Sekolah Penggerak, yang selanjutnya akan terus bertambah untuk dikembangkan pada satuan pendidikan lainnya.	$(\Sigma \text{ satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran paradigma baru} / (\Sigma \text{ satuan pendidikan}) \times 100 \%$	Meningkatnya persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran paradigma baru mendekati 100%	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Dapodik, BSKAP
SP	Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran					
IKP 2.2.7	Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan profil dan rapor pendidikan untuk mendukung perbaikan pembelajaran	Pemanfaatan profil dan rapor pendidikan oleh satuan pendidikan digunakan untuk mengevaluasi secara keseluruhan proses belajar mengajar antara guru dan peserta didik yang didukung	$(\Sigma \text{ satuan pendidikan yang memanfaatkan profil dan rapor pendidikan untuk mendukung perbaikan pembelajaran} / \Sigma \text{ seluruh satuan pendidikan}) \times 100 \%$	Meningkatnya persentase satuan pendidikan memanfaatkan profil dan rapor pendidikan untuk mendukung perbaikan pembelajaran mendekati 100%	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Profil dan Rapor Pendidikan

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
		dengan sarana dan prasana yang ada di sekolah. Selain itu, profil dan rapor pendidikan akan digunakan oleh satuan pendidikan dalam memfasilitasi perencanaan penganggaran, pelaksanaan pembelajaran dan penatausahaan di sekolah				
SP	Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter					
IKP 2.3.1	Persentase satuan pendidikan yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	Kegiatan-kegiatan di satuan pendidikan yang menunjang untuk melatih kepemimpinan, kepribadian dan pengembangan budi pekerti peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler dengan melibatkan para pemangku kepentingan berdasarkan hasil penilaian dari survei karakter	$(\Sigma \text{ satuan pendidikan yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik} / \Sigma \text{ satuan pendidikan}) \times 100 \%$	Meningkatnya persentase satuan pendidikan yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik mendekati 100%	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Inventori Data Hasil Asesmen Nasional
SP	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi					

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
IKP 5.3.6	Predikat SAKIP Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen	Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja]	Meningkatnya nilai dan predikat SAKIP	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Laporan hasil evaluasi SAKIP
SP	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek					
IKP 5.4.4	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan ZI WBK/WBBM di instansi pemerintah, kriteria satker untuk dapat ditetapkan sebagai satker ZI WBK/WBBM sebagai berikut: WBK adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja/satker di lingkungan Kemendikbud yang mencapai indeks reformasi birokrasi paling sedikit 75, dan mencapai WBBM ketika unit kerja/satker di lingkungan Kemendikbud mencapai indeks reformasi birokrasi paling sedikit 85	Σ satker yang ditetapkan oleh KemenPANRB pada tahun berjalan + Σ satker yang telah ditetapkan oleh KemenPANRB pada tahun-tahun sebelumnya	Meningkatnya jumlah satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Keputusan Menteri PAN-RB

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
SK	Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas					
IKK 1.1.1.1	Jumlah satuan PAUD menerima program afirmasi	Kebijakan afirmasi pendidikan merupakan momentum awal untuk tercapainya cita-cita akses pendidikan yang berkeadilan. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanat konstitusi tidak akan pernah tercipta jika pendidikan hanya dinikmati oleh mereka di daerah yang dekat dengan pusat. Program afirmasi ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah	Σ Satuan Pendidikan jenjang PAUD yang menerima Program Afirmasi	Tersalurkannya program afirmasi ke satuan PAUD yang berhak mendapatkan	Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.	APBN
SK	Meningkatnya capaian perkembangan PAUD yang berkualitas					
IKK 2.1.1.1	Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integratif	Persentase jumlah satuan PAUD yang telah memberikan layanan secara holistik integratif berdasarkan indikator pada Dapodik, yaitu: 1. Adanya fasilitas sanitasi (toilet, fasilitas cuci tangan dengan air mengalir, dan instalasi air) 2. Adanya jadwal pemeriksaan kesehatan dasar (tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala) 3. Adanya jadwal pemberian makanan tambahan 4. Adanya jadwal pemeriksaan Deteksi	$(\Sigma \text{ satuan PAUD yang telah memenuhi minimal 6 dari 8 indikator PAUD HI di dapodik} / \Sigma \text{ seluruh jumlah satuan PAUD yang ada}) \times 100 \%$	Meningkatnya persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integratif mendekati 100%	Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Dapodik

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
		Dini Tumbuh Kembang (DDTK) 5. Adanya kelompok pertemuan orang tua (KPO) 6. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (Indikator Dapodik: Kegiatan Cuci Tangan) 7. Memiliki informasi identitas peserta didik (NIK). 8. Adanya sistem rujukan DDTK ke puskesmas				
SK	Meningkatnya pembelajaran PAUD yang berkualitas					
IKK 2.2.1.1	Jumlah PAUD Penggerak	Satuan PAUD Penggerak merupakan katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Visi Pendidikan Indonesia yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis; kreatif; mandiri; beriman bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia; bergotong royong dan berkebinekaan global.	Σ satuan pendidikan PAUD Penggerak sesuai SK yang telah terbit	Meningkatnya jumlah PAUD penggerak mendekati jumlah seluruh PAUD	Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Database Sekolah Penggerak

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
IKK 2.2.2.1	Persentase satuan PAUD yang menerapkan pembelajaran paradigma baru	Jumlah satuan Paud penggerak yang menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila. Kurikulum paradigma baru tersebut akan mulai digunakan di Sekolah Penggerak, yang selanjutnya akan terus bertambah untuk dikembangkan pada satuan pendidikan lainnya	$(\sum \text{satuan PAUD yang menerapkan pembelajaran paradigma baru} / \sum \text{seluruh satuan PAUD}) \times 100 \%$	Meningkatnya persentase satuan PAUD yang menerapkan pembelajaran paradigma baru mendekati 100%	Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Dapodik
IKK 2.2.7.1	Persentase satuan PAUD yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran	Satuan PAUD yang didampingi dalam meningkatkan mutu pembelajaran untuk peningkatan mutu pendidikan daerah melalui profil dan rapor mutu pendidikan daerah. Pendampingan dilakukan melalui program kegiatan direktorat dan juga dengan pemberian bantuan kepada kab/kota untuk meningkatkan mutu pembelajaran satuan PAUD di wilayahnya	$(\sum \text{satuan PAUD yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran} / \sum \text{satuan PAUD secara keseluruhan}) \times 100 \%$	Meningkatnya persentase satuan PAUD yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran mendekati 100%	Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Laporan Internal Dit. PAUD
IKK 2.2.7.2	Persentase satuan PAUD yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas	Satuan PAUD yang memiliki perangkat pendidikan yang berkualitas dengan indikator-indikator yaitu: 1. Memiliki minimal satu judul buku bacaan PAUD 2. Memiliki minimal satu komputer/Laptop 3. Memiliki minimal satu APE bahan alam	$(\sum \text{Satuan PAUD yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas} / \sum \text{seluruh satuan PAUD}) \times 100 \%$	Meningkatnya persentase satuan PAUD yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran mendekati 100%	Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Dapodik

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
		4.Memiliki minimal satu tambahan				
SK	Tersedianya layanan SD yang merata dan berkualitas					
IKK 1.2.1.1	Jumlah SD menerima program afirmasi	Kebijakan afirmasi pendidikan merupakan momentum awal untuk tercapainya cita-cita akses pendidikan yang berkeadilan. Menerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanat konstitusi tidak akan pernah tercipta jika pendidikan hanya dinikmati oleh mereka di daerah yang dekat dengan pusat. Program afirmasi ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah. Perhitungan dilakukan pada jenjang SD	Σ Satuan Pendidikan jenjang SD yang menerima Program Afirmasi	Tersalurkannya program afirmasi ke satuan SD yang berhak mendapatkan	Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	APBN
SK	Meningkatnya pembelajaran Sekolah Dasar yang berkualitas					
IKK 2.2.1.2	Jumlah SD Penggerak	SD Penggerak merupakan katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Visi Pendidikan Indonesia yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis; kreatif; mandiri; beriman bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia; bergotong	Σ satuan pendidikan SD Penggerak sesuai SK yang telah terbit	Meningkatnya jumlah SD penggerak mendekati jumlah seluruh SD	Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Database Sekolah Penggerak

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
		royong dan berkebinekaan global				
IKK 2.2.2.2	Persentase SD yang menerapkan pembelajaran paradigma baru	Kurikulum dengan pembelajaran paradigma baru menjadi langkah strategis dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hal ini karena pembelajaran berpusat pada siswa dan memberikan kemerdekaan bagi guru maupun peserta didik untuk berinovasi dan berkreatifitas dalam mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna	$(\sum \text{SD yang menerapkan pembelajaran paradigma baru} / \sum \text{seluruh satuan pendidikan SD}) \times 100 \%$	Meningkatnya persentase satuan SD yang menerapkan pembelajaran paradigma baru mendekati 100%	Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Dapodik
IKK 2.2.7.3	Persentase SD yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran	SD yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran adalah SD yang dilakukan intervensi berupa pembinaan terkait hasil rapor satuan pendidikan/profil satuan pendidikan. Rapor satuan pendidikan/profil satuan pendidikan merupakan hasil penilaian Asesmen Nasional yang terdiri dari penilaian Asesmen Kompetensi Minimum (Literasi dan Numerasi), Survei Karakter, dan Survei lingkungan belajar	$(\sum \text{SD yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran} / \sum \text{seluruh satuan pendidikan SD}) \times 100 \%$	Meningkatnya persentase satuan SD yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran mendekati 100%	Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Laporan Internal Dit SD

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
IKK 2.2.7.4	Persentase SD yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas	SD yang memiliki peralatan pendidikan berkualitas berupa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menunjang proses pembelajaran dengan indikator minimal yang ditetapkan. Penggunaan peralatan TIK ini tentunya didukung dengan ketersediaan aliran listrik yang memadai di sekolah	$(\sum \text{SD penerima bantuan TIK} / \sum \text{seluruh satuan pendidikan SD}) \times 100 \%$	Meningkatnya persentase satuan SD yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran mendekati 100%	Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Dapodik
SK	Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter Peserta didik Sekolah Dasar					
IKK 2.3.1.1	Persentase SD yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	Indeks karakter menunjukkan tingkat/ukuran karakter peserta didik dari suatu SD tertentu yang dinilai berdasarkan 6 dimensi karakter Profil Pelajar Pancasila. SD dinilai mempunyai indeks karakter baik apabila SD tersebut berada pada level membudaya	$(\sum \text{satuan pendidikan pada jenjang SD dengan indeks karakter pada kategori baik} / \sum \text{seluruh satuan pendidikan pada jenjang SD}) \times 100 \%$	Meningkatnya persentase satuan SD yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik mendekati 100%	Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Inventori data hasil AN
SK	Tersedianya layanan pendidikan SMP yang merata dan berkualitas					
IKK 1.3.1.1	Jumlah SMP menerima program afirmasi	Kebijakan afirmasi pendidikan merupakan momentum awal untuk tercapainya cita-cita akses pendidikan yang berkeadilan. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanat konstitusi tidak akan pernah tercipta jika pendidikan hanya dinikmati oleh mereka di daerah yang dekat dengan	$\sum \text{Satuan Pendidikan jenjang SMP yang menerima Program Afirmasi}$	Tersalurkannya program afirmasi ke satuan SMP yang berhak mendapatkan	Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	APBN

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
		pusat. Program afirmasi ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah. Perhitungan dilakukan pada jenjang SMP				
SK	Meningkatnya pembelajaran SMP yang berkualitas					
IKK 2.2.1.3	Jumlah SMP Penggerak	SMP Penggerak merupakan katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia pada sekolah jenjang SMP. Visi Pendidikan Indonesia yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis; kreatif; mandiri; beriman bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia; bergotong royong dan berkebinekaan global	Σ satuan pendidikan SMP Penggerak sesuai SK yang telah terbit	Meningkatnya jumlah SMP penggerak mendekati jumlah seluruh SMP	Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Database Sekolah Penggerak
IKK 2.2.2.3	Persentase SMP yang menerapkan pembelajaran paradigma baru	Jumlah SMP penggerak yang menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila. Kurikulum paradigma baru tersebut akan mulai digunakan di Sekolah Penggerak, yang selanjutnya akan terus bertambah untuk	$(\Sigma \text{ SMP yang menerapkan pembelajaran paradigma baru}) / \Sigma \text{ seluruh satuan pendidikan SMP}) \times 100 \%$	Meningkatnya persentase satuan SMP yang menerapkan pembelajaran paradigma baru mendekati 100%	Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Dapodik

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
		dikembangkan pada satuan pendidikan lainnya.				
IKK 2.2.7.5	Persentase SMP yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran	SMP yang didampingi dalam meningkatkan mutu pembelajaran untuk peningkatan mutu pendidikan daerah melalui profil dan rapor pendidikan daerah. Pendampingan dilakukan melalui program kegiatan direktorat dan juga dengan pemberian bantuan kepada kab/kota untuk meningkatkan mutu pembelajaran satuan SMP di wilayahnya	$(\sum \text{SMP yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran}) / \sum \text{seluruh satuan pendidikan SMP} \times 100 \%$	Meningkatnya persentase satuan SMP yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran mendekati 100%	Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Laporan Internal Dit SMP
IKK 2.2.7.6	Persentase SMP yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas	Perbandingan jumlah satuan pendidikan SMP yang memiliki peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan digunakan dalam pembelajaran. Yang termasuk dalam TIK tidak hanya komputer namun semua alat yang menunjang teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan untuk menunjang proses belajar mengajar termasuk kelengkapannya	$(\sum \text{SMP yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas}) / \sum \text{seluruh satuan pendidikan SMP} \times 100 \%$	Meningkatnya persentase satuan SMP yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran mendekati 100%	Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Dapodik

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
SK	Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter Peserta didik SMP					
IKK 2.3.1.2	Persentase SMP yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	Indeks karakter menunjukkan tingkat/ukuran karakter peserta didik dari suatu SMP tertentu yang dinilai berdasarkan 6 dimensi karakter Profil Pelajar Pancasila. SMP dinilai mempunyai indeks karakter baik apabila SMP tersebut berada pada level membudaya.	$(\sum \text{satuan pendidikan pada jenjang SMP dengan indeks karakter pada kategori baik} / \sum \text{seluruh satuan pendidikan pada jenjang SMP}) \times 100 \%$	Meningkatnya persentase satuan SMP yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik mendekati 100%	Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Inventori data hasil AN
SK	Tersedianya layanan pendidikan SMA yang merata dan berkualitas					
IKK 1.4.1.1	Jumlah SMA menerima program afirmasi	Kebijakan afirmasi pendidikan merupakan momentum awal untuk tercapainya cita-cita akses pendidikan yang berkeadilan. Mencedaskan kehidupan bangsa sebagai amanat konstitusi tidak akan pernah tercipta jika pendidikan hanya dinikmati oleh mereka di daerah yang dekat dengan pusat. Program afirmasi ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah. Perhitungan dilakukan pada jenjang SMA	$\sum$ Satuan Pendidikan jenjang SMA yang menerima Program Afirmasi	Tersalurkannya program afirmasi ke satuan SMA yang berhak mendapatkan	Direktorat Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	APBN
SK	Meningkatnya pembelajaran SMA yang berkualitas					

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
IKK 2.2.1.4	Jumlah SMA Penggerak	SMA Penggerak merupakan katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Visi Pendidikan Indonesia yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis; kreatif; mandiri; beriman bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia; bergotong royong dan berkebinekaan global	Σ satuan pendidikan SMA Penggerak sesuai SK yang telah terbit	Meningkatnya jumlah SMA penggerak mendekati jumlah seluruh SMA	Direktorat Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Database Sekolah Penggerak
IKK 2.2.2.4	Persentase SMA yang menerapkan pembelajaran paradigma baru	Jumlah SMA penggerak yang menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila. Kurikulum paradigma baru tersebut akan mulai digunakan di Sekolah Penggerak, yang selanjutnya akan terus bertambah untuk dikembangkan pada satuan pendidikan lainnya	$(\Sigma \text{ Jumlah SMA yang menerapkan pembelajaran paradigma baru} / \Sigma \text{ seluruh satuan pendidikan SMA}) \times 100 \%$	Meningkatnya persentase satuan SMA yang menerapkan pembelajaran paradigma baru mendekati 100%	Direktorat Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Dapodik
IKK 2.2.2.7	Persentase SMA yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran	SMA yang didampingi dalam meningkatkan mutu pembelajaran untuk peningkatan mutu pendidikan daerah melalui profil dan rapor pendidikan daerah. Pendampingan dilakukan dengan menyiapkan langkah identifikasi hasil rapor,	$(\Sigma \text{ SMA yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran} / \Sigma \text{ seluruh satuan pendidikan SMA}) \times 100 \%$	Meningkatnya persentase satuan SMA yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran mendekati 100%	Direktorat Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Laporan Internal Dit SMA

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
		melakukan sosialisasi dan advokasi kepada pemda dan bersama pemda melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi ke beberapa sekolah untuk mengetahui kendala yang dialami pada saat implementasi				
IKK 2.2.7.8	Persentase SMA yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas	Perbandingan jumlah satuan pendidikan SMA yang memiliki peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan digunakan dalam pembelajaran. Yang termasuk dalam TIK tidak hanya komputer namun semua alat yang menunjang teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan untuk menunjang proses belajar mengajar termasuk kelengkapannya. Data penggunaan TIK tersebut dalam kegiatan belajar mengajar didapat dari sejumlah data pengisian pada Dapodik	$(\sum \text{SMA yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran} / \sum \text{seluruh satuan pendidikan SMA}) \times 100 \%$	Meningkatnya persentase satuan SMA yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran mendekati 100%	Direktorat Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Dapodik
SK	Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter Peserta didik SMA					

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
IKK 2.3.1.3	Persentase SMA yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	Indeks karakter menunjukkan tingkat/ukuran karakter peserta didik dari suatu SMA tertentu yang dinilai berdasarkan 6 dimensi karakter Profil Pelajar Pancasila. SMA dinilai mempunyai indeks karakter baik apabila SMA tersebut berada pada level membudaya	$(\sum \text{satuan pendidikan pada jenjang SMA dengan indeks karakter pada kategori baik} / \sum \text{seluruh satuan pendidikan pada jenjang SMA}) \times 100 \%$	Meningkatnya persentase satuan SMA yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik mendekati 100%	Direktorat Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Inventori data hasil AN
SK	Tersedianya layanan PMPK yang merata dan berkualitas					
IKK 1.4.1.2	Persentase Prov/Kab/Kota yang menyediakan pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus	Banyaknya Provinsi/Kabupaten/Kota yang memfasilitasi penyelenggaraan program pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan non formal (SKB/PKBM) dan SLB serta Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusi	$(\sum \text{Prov/Kab/Kota yang menyediakan program pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus} / \sum \text{seluruh Prov/kab/kota}) \times 100 \%$	Meningkatnya persentase Prov/Kab/Kota yang menyediakan pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus mendekati 100%	Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Dapodik
SK	Meningkatnya pembelajaran PMPK yang berkualitas					
IKK 2.2.1.5	Jumlah SLB Penggerak	SLB Penggerak merupakan katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Visi Pendidikan Indonesia yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis; kreatif; mandiri; beriman bertakwa	$\sum \text{satuan pendidikan SLB Penggerak sesuai SK yang telah terbit}$	Meningkatnya jumlah SLB penggerak mendekati jumlah seluruh SLB	Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Database Sekolah Penggerak

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
		kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia; bergotong royong dan berkebinekaan global				
IKK 2.2.2.5	Persentase Lembaga Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus yang menerapkan pembelajaran paradigma baru	Jumlah Lembaga PMPK yang menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi, kemandirian/keterampilan dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila. Kurikulum paradigma baru tersebut akan mulai digunakan di Sekolah Penggerak, yang selanjutnya akan terus bertambah untuk dikembangkan pada satuan pendidikan lainnya	$(\Sigma \text{SLB yang menerapkan pembelajaran paradigma baru} / \Sigma \text{seluruh satuan pendidikan SLB}) \times 100 \%$	Meningkatnya persentase Lembaga Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus yang menerapkan pembelajaran paradigma baru mendekati 100%	Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Dapodik
IKK 2.2.7.9	Persentase Lembaga Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran	Penguatan penyiapan profil belajar siswa dilakukan melalui identifikasi dan asesmen peserta didik untuk mendapatkan informasi terkait kondisi siswa dari aspek keragaman disabilitas maupun kondisi kemampuan intelektual, mental dan komunikasi	$(\Sigma \text{SLB yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran} / \Sigma \text{SLB secara keseluruhan}) \times 100 \%$	Meningkatnya persentase Lembaga Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran mendekati 100%	Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Laporan Internal Dit. PMPK
IKK 2.2.7.10	Persentase SLB yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas	Jumlah SLB yang memiliki peralatan pembelajaran yang memadai untuk mencapai kompetensi pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan ragam disabilitas dan program keterampilan	$(\Sigma \text{SLB yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran} / \Sigma \text{seluruh satuan pendidikan SLB}) \times 100 \%$	Meningkatnya persentase satuan SLB yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran mendekati 100%	Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,	Dapodik

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
					dan Pendidikan Menengah	
SK	Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter Peserta didik PMPK					
IKK 2.3.1.4	Persentase Lembaga Pendidikan Kesetaraan dan SLB yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	Indeks karakter menunjukkan tingkat/ukuran karakter peserta didik dari suatu Lembaga Pendidikan Kesetaraan dan SLB tertentu yang dinilai berdasarkan 6 dimensi karakter Profil Pelajar Pancasila. Lembaga Pendidikan Kesetaraan dan SLB dinilai mempunyai indeks karakter baik apabila Lembaga Pendidikan Kesetaraan dan SLB tersebut berada pada level membudaya	$(\Sigma \text{ satuan pendidikan pada jenjang Lembaga Pendidikan Kesetaraan dan SLB dengan indeks karakter pada kategori baik} / \Sigma \text{ seluruh satuan pendidikan pada jenjang Lembaga Pendidikan Kesetaraan dan SLB}) \times 100 \%$	Meningkatnya persentase Lembaga Pendidikan Kesetaraan dan SLB yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik mendekati 100%	Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Inventori data hasil AN
SK	Menguatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen					
IKK 5.3.6.1	Persentase Satker di Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang memiliki predikat SAKIP minimal A	Persentase satker yang predikat SAKIP-nya minimal "A" adalah untuk mengukur jumlah satker di lingkungan Kemendikbud yang penyelenggaraan SAKIP telah mencapai predikat minimal "A", sebagai hasil dari pembinaan yang dilakukan Biro Perencanaan. Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai	$(\Sigma \text{ Satuan Kerja di lingkungan pauddasmen yang Nilai SAKIPnya minimal A} / \Sigma \text{ Satker di lingkungan Ditjen PAUDDasmen}) \times 100 \%$	Meningkatnya persentase Satker di Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang memiliki predikat SAKIP minimal A mendekati 100%	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Laporan hasil evaluasi SAKIP

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
		aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah				
IKK 5.4.5.1	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang diusulkan untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK dan WBBM oleh Menpan adalah satker yang memenuhi 6 komponen, diantaranya: manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas layanan publik	Σ satker yang diusulkan oleh Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen untuk mendapat predikat ZI-WBK/WBBM	Jumlah satker yang diusulkan di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM mendekati jumlah seluruh satker di Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Surat Usulan Eselon I kepada Sekretaris Jenderal
SK	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen					
IKK 2.2.7.11	Persentase satuan pendidikan (paud dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	Persentase dari satuan paud dan dikmas di wilayah masing masing yang memiliki mutu pembelajaran lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya berdasarkan hasil rapor pendidikan atau survey lingkungan belajar	$(\Sigma \text{ satuan PAUD dan Dikmas yang rapor Pendidikan atau survey lingkungan belajar meningkat} / \Sigma \text{ satuan PAUD dan Dikmas pada provinsi/Kab/Kota yang bersangkutan}) \times 100 \%$	Meningkatnya persentase satuan pendidikan (paud dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya mendekati 100%	Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
IKK 2.2.7.12	Persentase Prov/Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	Persentase dari provinsi/kabupaten/kota di wilayah masing masing yang memiliki rapor pendidikan lebih tinggi dibandingkan rapor pendidikan tahun sebelumnya	$(\Sigma \text{ satuan Dikdas dan Dikmen yang rapor Pendidikannya meningkat} / \Sigma \text{ satuan Dikdas dan Dikmen pada provinsi/Kab/Kota yang bersangkutan}) \times 100 \%$	Meningkatnya persentase Prov/Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) per tahun mendekati 100%	Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen